



**RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja ) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTTK) Kabupaten Balangan tahun 2022 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. dengan mengacu kepada Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Penyusunan Renja DPMPTSPTTK Kab. Balangan Tahun 2022 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Renja DPMPTSPTTK Kab. Balangan Tahun 2022 ini. Kami menyadari Renja ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, besar harapan semoga Renja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang. Demi kesempurnaan Renja ini untuk meningkatkan kinerja DPMPTSPTTK Kab. Balangan, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Paringin, Agustus 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
Transmigrasi, dan Tenaga Kerja**



**H. ABIJI, S.Pd, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690813 199412 1 002





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan Renja.....	6
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan DISNAKERTRANS Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2020 .....	7
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2020.....	7
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DISNAKERTRANS Tahun 2020.....	28
2.2 Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	38
2.2.1 Capaian Kinerja DPMPTSP .....	38
2.2.2 Capaian Kinerja DISNAKERTRANS .....	46
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMTSP Kab. Balangan .....	46
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	47
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>52</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	54
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2022.....	57
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen rancangan awal rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rancangan awal Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rancangan Awal Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.

- c. Rancangan Awal Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Awal Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang antara lain :

- a. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
- b. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- c. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat peranan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahunan 2022.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang

berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, selaras dengan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2022 dijadikan salah satu dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan urusan bidang penanaman modal, tenaga kerja ,dan transmigrasi serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal, tenaga kerja, dan transmigrasi untuk tahun 2022 sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat dicapai secara optimal.

## **1.4 Sistematika Penulisan Renja**

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DPMPTSPTTK.

**BAB II            HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPMPTSPTTK  
TAHUN 2020**

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 mengacu pada APBD tahun 2021 dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III            TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan

**BAB IV            RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya.

**BAB V            PENUTUP**

Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja DPMPTSP tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis DPMPTSP 2016-2021.

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP dan DISNAKERTRANS Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2020**

**2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2020**

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah Meningkatnya Investasi Daerah melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi mendukung terhadap terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, program yang dilaksanakan oleh DPMPTSP pada tahun 2020 masih sama berjumlah 9 program. Perbedaannya hanya pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Jika pada tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan berjumlah 37 kegiatan, sedangkan di tahun 2020 bertambah menjadi 40 kegiatan. Jumlah program/kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Tahun 2020 berjumlah 9 program dan 40 kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 cukup baik, yaitu sebesar Rp 3.275.399.877,00 atau 97,79 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp 3.330.446.200,00.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Realisasi Keuangan Program Kegiatan DPMPTSP Kab. Balangan Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020**

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>946.605.700,00</b>	<b>938.586.677,00</b>	<b>99,15</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	10.050.000,00	10.050.000,00	100	100
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.400.000,00	91.883.577,00	92,44	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	278,014,000.00	277,538,800.00	99.83	100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,934,300.00	15,934,300.00	100	100
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	34,797,200.00	34,769,800.00	99.92	100
6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44,221,500.00	44,221,500.00	100	100
7	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,628,700.00	15,628,700.00	100	100
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000.00	4,000,000.00	100	100
9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	18,560,000.00	18,560,000.00	100	100

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
10	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300,000,000.00	300,000,000.00	100	100
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	126,000,000.00	126,000,000.00	100	100
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>359.704.000,00</b>	<b>353.628.000,00</b>	<b>98,31</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	33.904.000,00	33.900.000,00	99,99	100
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	36.250.000,00	36.200.000,00	99,86	100
3	Kegiatan Pengadaan Komputer	95.900.000,00	95.900.000,00	100	100
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	126.650.000,00	125.828.000,00	99,35	100
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	67.000.000,00	61.800.000,00	92,24	100
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.500.000,00	22.500.000,00	100	100
2	Pengadaan pakaian kedaerahan	20,000,000,00	20.000.000,00	100	100

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
<b>D.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>51,500,000</b>	<b>51,500,000</b>	<b>99,76</b>	<b>100</b>
1.	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	51,500,000	51,500,000	99,76	100
<b>E.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>28.173.000,00</b>	<b>28.173.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.001.000,00	14.001.000,00	100	100
2	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	14.172.000,00	14.172.000,00	100	100
<b>F.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>1.493.072.000,00</b>	<b>1.469.095.000,00</b>	<b>98,39</b>	<b>100</b>
1	Peningkatan Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	31.388.000,00	31.388.000,00	100	100
2	Pengembangan potensi unggulan daerah	1.352.924.000,00	1.329.417.000,00	98,26	100
3	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	55.300.000,00	54.830.000,00	99,15	100
4	Penyelenggaraan Pameran Investasi	53.460.000,00	53.460.000,00	100	0
<b>G.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>371,768,000</b>	<b>367,950,875</b>	<b>98.81</b>	<b>100</b>

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
1	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	59.050.000,00	58.300.000,00	98,73	100
1	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	59.050.000,00	58.300.000,00	98,73	100
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.946.400,00	11.946.400,00	100	100
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	24.375.000,00	23.990.000,00	98,42	209,09
<b>H.</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan</b>	<b>62.431.000,00</b>	<b>57.828.900,00</b>	<b>92,63</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	37.800.900,00	37.800.900,00	100	185,33
2	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	18.070.100,00	15.068.000,00	83,39	100
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan	6.560.000,00	4.960.000,00	75,61	113
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik</b>	<b>157.589.100,00</b>	<b>146.701.900,00</b>	<b>93,09</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	40.300.000,00	40.000.000,00	99,26	100
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	5.400.000,00	5.400.000,00	100	100
	Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	27.357.700,00	25.580.500,00	93,50	400
	Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	48.000.000,00	39.190.000,00	81,65	100



No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
	Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	16.531.600,00	16.531.600,00	100	100
	Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	19.999.800,00	19.999.800,00	100	400
		<b>3.330.446.200,00</b>	<b>3.275.399.877,00</b>	<b>97,79</b>	<b>100</b>

### **Realisasi Program dan Kegiatan.**

#### **1. Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - Tujuan : Menyediakan kelengkapan dan layanan surat – menyurat sehingga terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.
  - Output : Tersedianya jasa surat menyurat dan kelengkapannya.
  - Realisasi kegiatan fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu perlengkapan surat-menyurat seperti amplop, perangko, materai serta benda – benda pos lainnya.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
  - Tujuan : Menyediakan jaringan telepon kantor, jaringan internet, air bersih dan listrik di lingkungan.
  - Output : Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
  - Realisasi kegiatan fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu terbayarnya jasa telepon, jasa layanan internet, air dan listrik.
- c. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
  - Tujuan : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan
  - Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya 2 orang Pengadministrasian Keuangan dan 16 Pengadministrasian Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Tujuan : Menyediakan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan kebersihan kantor.
  - Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya 2 orang petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan dan lain-lain
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- Tujuan : Menyediakan alat tulis kantor dalam rangka kelancaran kegiatan administrasi DPMPTSP
  - Output : Tersedianya alat tulis kantor
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya bahan pakai habis alat tulis kantor.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Tujuan : Menyediakan barang cetak dan penggandaan untuk administrasi perkantoran.
  - Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu pencetakan, fotokopi, cetak brosur-brosur, banner dan lain-lain
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Tujuan : Menyediakan instalasi listrik dalam rangka menunjang operasional kegiatan di DPMPTSP.
  - Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya jaringan instalasi listrik, kabel-kabel, dan peralatan listrik lainnya lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk menunjang kelancaran pekerjaan terutama bagian pelayanan.
- h. Penyediaan bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan
- Tujuan : Menyediakan bahan bacaan dan perundang – undangan untuk memperlancar pengetahuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Output : Tersedianya bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan

- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya layanan koran dari 2 jenis koran harian dengan rincian 1 harian 2 eks/hari dan 1 harian 1 eks/hari dan buku bacaan dan perundang-undangan.
- i. Penyediaan makanan dan minuman
    - Tujuan : Menyediakan menyediakan makan dan minum rapat dan juga untuk tamu-tamu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
    - Output : Tersedianya makanan dan minuman
    - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, penyediaan snack untuk rapat dan tamu.
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
    - Tujuan : Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan rapat-rapat keluar daerah.
    - Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
    - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu Kegiatan Koordinasi dan rapat-rapat keluar daerah ini dianggarkan dengan target 12 bulan kegiatan.
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
    - Tujuan : Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan rapat-rapat dalam daerah
    - Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
    - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu Kegiatan Koordinasi dan rapat-rapat dalam daerah ini dianggarkan dengan target 12 bulan kegiatan.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

- a. Pengadaan mebeuler
  - Tujuan : Menyediakan pengadaan mebeuler untuk kelancaran kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Output : Tersedianya mebeuler.
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu 4 buah lemari buku dan 1 paket meja partisi dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- b. Pengadaan peralatan kantor

- Tujuan : Menyediakan peralatan kantor untuk kelancaran kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Output : Tersedianya peralatan kantor.
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu 2 unit dispenser, 2 unit kulkas, 1 unit smart TV telah tersedia dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Pengadaan Komputer
- Tujuan : Menyediakan komputer beserta perlengkapannya untuk kelancaran kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - Output : Tersedianya komputer
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu 3 unit laptop/notebook, 2 buah printer infus, 4 buah scanner portable dan 1 unit tablet.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Tujuan : Menyelenggarakan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor.
  - Output : Terpeliharanya rutin berkala kendaraan dinas/operasional
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi servis rutin, penggantian suku cadang, penyediaan bahan bakar minyak dan penggantian oli serta pembayaran pajak mobil dan kendaraan dinas serta ditambah 1 orang sopir selama 1 tahun.
- e. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
- Tujuan : Menyelenggarakan pemeliharaan rutin/ berkala gedung DPMPTSP
  - Output : Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi pengecoran halaman kantor.

### **3. Progam Peningkatan Disiplin Aparatur.**

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Tujuan : Menyediakan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk aparaturnya DPMPTSP
  - Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi pengadaan pakaian dinas harian 45 stel.

d. Pengadaan pakaian kedaerahan

- Tujuan : Menyediakan pakaian kedaerahan untuk aparaturnya DPMPTSP
- Output : Tersedianya pakaian kedaerahan
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu pengadaan pakaian sasirangan 40 stel.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

a. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- Tujuan : Tersebarannya pengetahuan sumber daya aparaturnya
- Output : Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu untuk kemajuan pengetahuan aparaturnya yang mana ditargetkan yang mengikuti sebanyak 24 orang.

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Tujuan : Terlaksananya penyusunan Renja, Renja Perubahan, LKjP, LPPD dan Laporan Keuangan
- Output : Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, LKjP, LPPD dan Laporan Keuangan
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi penyelenggaraan penyusunan dokumen Renja, Renja Perubahan, LKjP, LPPD dan Laporan Keuangan

b. Penyusunan RKA dan DPA SKPD

- Tujuan : Terlaksananya pelaporan RKA dan DPA
- Output : Tersusunnya RKA, dan DPA SKPD DPMPTSP
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi penggandaan, fotokopi, dan penjilidan, ATK serta makan minum rapat penyusunan dokumen RKA dan DPA.

## **6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Sasaran Program ini adalah persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti. Realisasi kinerja indikator dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Peningkatan kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah
  - Tujuan : persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti
  - Output: Terlaksananya kerjasama antar usaha besar dan usaha kecil menengah
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 700 % yaitu Jumlah Kerjasama Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah terealisasi sebanyak 7 Mou.
- b. Pengembangan potensi unggulan daerah
  - Tujuan : persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti
  - Output : Terlaksananya penyusunan dokumen potensi daerah
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %, yaitu Jumlah Potensi Unggulan yang Terekspose terealisasi sebanyak 2 dokumen.
- c. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
  - Tujuan : Persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti
  - Output : Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
  - Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu tersusunnya dokumen RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) terealisasi sebanyak 1 dokumen.
- d. Penyelenggaraan Pameran Investasi
  - Tujuan : Persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti
  - Output : Terlaksananya pameran investasi
  - Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 0 % karena pandemi virus covid-19 kegiatan pameran investasi tingkat Kabupaten tidak dapat dilaksanakan.

## **7. Program Peningkatan Iklim Invetasi dan Realisasi Investasi**

Sasaran Program ini adalah meningkatnya nilai investasi daerah. Realisasi kinerja indikator dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
  - Tujuan : Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)
  - Output : Terlaksananya Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu penyusunan buku perkembangan penanaman modal kabupaten balangan tahun 2020. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi yakni dengan adanya kerjasama yang baik dan dukungan dari semua pihak dalam proses pengambilan dan penyusunan data sampai menjadi sebuah dokumen/buku terealisasi sebanyak 1 dokumen.
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - Tujuan : Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)
  - Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal.
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu data capaian nilai realisasi investasi penanaman modal khususnya data realisasi investasi terealisasi sebanyak 1 laporan.
- c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Tujuan : Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)
  - Output : Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Realisasi Fisik kegiatan sebesar 209 % yaitu Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) lebih banyak dibandingkan target kinerja yang telah direncanakan 11 perusahaan terealisasi sebanyak 23 perusahaan.

## **8. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan**

Sasaran Program ini adalah meningkatnya Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Realisasi kinerja indikator dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan dan Non Perizinan
  - Tujuan : Tersedianya Kelengkapan Teknis dan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan
  - Output : Jumlah Izin yang diterbitkan
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 185,33% yaitu 1.112 izin yang diterbitkan
- b. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan
  - Tujuan : Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP
  - Output : Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan.
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- c. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perizinan
  - Tujuan : Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP
  - Output : Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang harus dievaluasi
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 113% yaitu Jumlah Perizinan yang terevaluasi sebanyak 113 izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **9. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik**

Sasaran Program ini adalah Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat. Realisasi kinerja indikator dapat dilihat sebagai berikut:

- d. Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
  - Tujuan : Tersusunnya dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - Output: Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan Target nilai IKM 86% ,telah memperoleh hasil survey IKM senilai 88,50%. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi yakni dengan mengisi kuisisioner survey IKM maka



dapat mengukur kinerja pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kab. Balangan .

b. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan

- Tujuan : Tertanganinya Pengaduan yang masuk di DPMPTSP
- Output : Jumlah Unit Penanganan Pengaduan
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu Terbentuknya Unit Khusus Penanganan Pengaduan.

c. Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

- Tujuan : Tersebarinya Informasi Perizinan dan penanaman Modal
- Output : Jumlah Publikasi Informasi Perizinan dan penanaman Modal
- Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 400% yaitu Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui Videotron, Brosur, Leaflet dan Spanduk.

d. Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

- Tujuan : Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik
- Output : Jumlah Naskah Akademik NSPK
- Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 100 % karena pihak ketiga tidak dapat memenuhi syarat administrasi dikarenakan waktu anggaran akan berakhir dan untuk tahun selanjutnya Anggaran dipindahkan.

e. Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

- Tujuan : Terlaksananya Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
- Output : Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal.
- Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 100 % , kegiatan sosialisasi dilaksanakan 2 kali.

f. Kodifikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang perizinan dan Penanaman Modal

- Tujuan : Terdokumentasinya NSPK Bidang perizinan dan Penanaman Modal
- Output : Jumlah NSPK yang didokumentasikan
- Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 400 % sebanyak 4 dokumen NSPK.

## **Alokasi dan Anggaran**

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp 15.400.000,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 atau terealisasi sebesar 77 %. Realisasi pendapatan daerah ini berasal dari Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 6.885.033.983,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 7.322.284.676,00. Realisasi belanja daerah ini 94,03 % berasal dari :
  - a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 5.504.387.733,00 atau terealisasi 92,73 % yang terdiri dari :
    - 1).Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 3.610.705.856,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 3.991.838.476,00 atau terealisasi sebesar 90,45 %
    - 2).Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 1.893.681.877,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 1.943.876.200,00 atau terealisasi sebesar 97,42 %
  - b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.380.646.250,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 1.386.570.000,00 atau terealisasi sebesar 99,57 %, terdiri dari :
    - 1).Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.251.377.250,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 1.256.770.000,00 atau terealisasi sebesar 99,57 %
    - 2).Realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp 129.269.000,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 129.800.000,00 atau terealisasi sebesar 99,59 %.

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

#### ➤ Penyediaan jasa surat menyurat

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat adalah senilai Rp 10.050.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 10.050.000,00 atau sebesar 100%.

#### ➤ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik adalah senilai Rp 99.400.000,00 yang semuanya

dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 91.883.577,00 atau sebesar 92,44 %.

➤ Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan adalah senilai Rp 278.014.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 277.538.800,00 atau sebesar 99,83 %.

➤ Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah senilai Rp 15.934.300,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 15.934.300,00 atau sebesar 100%.

➤ Penyediaan alat tulis kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan alat tulis kantor adalah senilai Rp 34.797.200,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 34.769.800,00 atau sebesar 99,92 %.

➤ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah senilai Rp 44.221.500,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 44.221.500,00 atau sebesar 100 %.

➤ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah senilai Rp 15.628.700,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 15.628.700,00 atau sebesar 100%.

➤ Penyediaan bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan adalah senilai Rp 4.000.000,00 yang semuanya

dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 atau sebesar 100 %.

➤ **Penyediaan makanan dan minuman**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah senilai Rp 18.560.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 18.560.000,00 atau sebesar 100 %.

➤ **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah senilai Rp 300.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 300.000.000,00 atau sebesar 100 %.

➤ **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah adalah senilai Rp 126.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 126.000.000,00 atau sebesar 100 %.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

➤ **Kegiatan pengadaan mebeleur**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Mebeleur adalah senilai Rp 33.904.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 33.900.000,00 atau sebesar 99,99 %.

➤ **Pengadaan peralatan kantor**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan peralatan kantor adalah senilai Rp 36.250.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja modal, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 36.200.000,00 atau sebesar 99,86 %.

➤ **Pengadaan Komputer**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Komputer adalah senilai Rp 95.900.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan

jasa, dan belanja modal, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 95.900.000,00 atau sebesar 100 %.

➤ **Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional adalah senilai Rp 126.650.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 125.828.000,00 atau sebesar 99,35 %.

➤ **Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor adalah senilai Rp 67.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 61.800.000,00 atau sebesar 92,24 %.

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

➤ **Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah senilai Rp 22.500.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 22.500.000,00 atau sebesar 100%.

➤ **Pengadaan pakaian kedaerahan**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan pakaian kedaerahan adalah senilai Rp. 20.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00 atau sebesar 100%.

### **4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

➤ **Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan adalah senilai Rp 145.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 144.650.000,00 atau sebesar 99,76 %.

## **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah senilai Rp 14.001.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 14.001.000,00 atau sebesar 100 %.

- Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan RKA dan DPA SKPD adalah senilai Rp 14.172.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 14.172.000,00 atau sebesar 100%.

## **6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

- Kegiatan Peningkatan kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kegiatan Peningkatan kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah adalah senilai Rp 31.388.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 31.388.000,00 atau sebesar 100 %.

- Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah adalah senilai Rp 1.352.924.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 1.329.417.000,00 atau sebesar 98,26 %.

- Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal adalah senilai Rp 55.300.000,00 yang

semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 54.830.000,00 atau sebesar 99,15 %.

➤ Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi adalah senilai Rp 53.460.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 53.460.000,00 atau sebesar 100 %.

## **7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi**

➤ Kegiatan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah adalah senilai Rp 59.050.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 58.300.000,00 atau sebesar 98,73 %.

➤ Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah senilai Rp 11.946.400,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 11.946.400,00 atau sebesar 100 %.

➤ Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah senilai Rp 24.375.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp 23.990.000,00 atau sebesar 98,42 %.

## **8. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan**

➤ Kegiatan Penyediaan jasa teknis perizinan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa teknis perizinan adalah senilai Rp 37.800.900,00 yang dialokasikan untuk belanja pegawai

dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar Rp 37.800.900,00 atau sebesar 100 %.

➤ Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi perizinan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi perizinan adalah senilai Rp 18.070.100,00 yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar Rp 16.068.000,00 atau sebesar 83,39 %.

➤ Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan adalah senilai Rp 6.560.000,00 yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar Rp 15.068.000,00 atau sebesar 75,61 %.

## **9. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik**

➤ Kegiatan Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah senilai Rp 40.300.000,00 yang dialokasikan untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar Rp 40.000.000,00 atau sebesar 99,26 %.

➤ Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah senilai Rp 5.400.000,00 yang dialokasikan untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar Rp 5.400.000,00 atau sebesar 100 %.

➤ Kegiatan Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal adalah senilai Rp 27.357.700,00 yang dialokasikan untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar Rp 25.580.500,00 atau sebesar 93,50 %.

➤ Kegiatan Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal



Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal adalah senilai Rp 48.000.000,00 yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar Rp 39.190.000,00 atau sebesar 81,65 %.

➤ Kegiatan Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal adalah senilai Rp 16.531.600,00 yang dialokasikan untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar Rp 16.531.600,00 atau sebesar 100 %.

➤ Kegiatan Kodifikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kodifikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal adalah senilai Rp 19.999.800,00 yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2020 sebesar Rp 19.999.800,00 atau sebesar 100 %.

### **2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DISNAKERTRANS Tahun 2020**

Pada tahun 2020 Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun 2020, capaian Rencana Kerja Tahun 2021 ( tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian.

Capaian kinerja tahun 2020 didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan mencakup 11 program dengan 41 kegiatan secara kumulatif capaian kinerja kegiatan (output) rata-rata hampir tercapai 100%. sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian	APBN	APBD	Jumlah
1	Jumlah Program	1	9	10
2	Jumlah Kegiatan	1	44	45
3	Alokasi Dana (Rp)	1.318.620.000	17.364.942.850	18.683.562.850
4	Realisasi Keuangan (Rp)	1.227.655.361	16.851.999.754	18.079.655.115
5	% Keuangan	93,10%	97,05%	96,77%

Berikut rincian realisasi kegiatan DPA-SKPD Tahun 2020 sampai dengan akhir Desember 2020.

#### Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>BELANJA</b>	<b>18.947.950.400</b>	<b>17.364.942.850</b>	<b>16.851.999.754</b>	<b>97,05</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.847.950.400</b>	<b>4.216.028.000</b>	<b>4.048.393.614</b>	<b>96,02</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.719.950.400	1.780.128.000	1.762.460.614	99,01
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.128.000.000	2.435.900.000	2.285.933.000	93,84
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>16.100.000.000</b>	<b>13.148.914.850</b>	<b>12.803.606.140</b>	<b>97,37</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.496.555.900</b>	<b>1.453.483.150</b>	<b>1.400.163.901</b>	<b>96,33</b>
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	145.000.000	225.000.000	201.402.521	89,51
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	294.454.300	175.834.300	172.784.000	98,27
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	272.161.100	256.040.400	242.024.000	94,53
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	90.672.400	74.400.500	74.380.200	99,97

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.358.500	52.597.100	50.973.500	96,84
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.140.600	26.616.600	26.564.000	99,80
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.500.000	77.200.000	72.755.000	94,24
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.040.000	0		
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	55.790.000	71.250.000	68.730.000	96,46
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	388.119.000	329.424.250	326.436.680	99,09
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	70.320.000	165.120.000	164.150.000	99,41
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.368.960.000</b>	<b>997.985.000</b>	<b>847.726.646</b>	<b>84,94</b>
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	821.020.000	303.550.000	234.117.000	77,13
Kegiatan pengadaan mebeleur	144.800.000	196.200.000	155.455.000	79,23
Kegiatan pengadaan komputer	10.000.000	32.915.000	32.750.000	99,50
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.060.000	55.440.000	55.440.000	100,00
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	278.480.000	287.480.000	247.969.646	86,26

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	54.600.000	62.400.000	62.115.000	99,54
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi	0	60.000.000	59.880.000	99,80
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>203.482.000</b>	<b>197.045.650</b>	<b>194.130.247</b>	<b>98,52</b>
Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	203.482.000	197.045.650	194.130.247	98,52
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>45.826.000</b>	<b>88.966.000</b>	<b>62.990.000</b>	<b>70,80</b>
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.180.000	29.320.000	28.860.000	98,43
Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran	905.000	905.000	750.000	82,87
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.150.000	1.150.000	1.140.000	99,13
Kegiatan penyusunan RKA dan DPA SKPD	8.600.000	30.300.000	16.860.000	55,64
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan SKPD	5.991.000	27.291.000	15.380.000	56,36
<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	<b>605.537.500</b>	<b>635.900.300</b>	<b>625.235.697</b>	<b>98,32</b>
Kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	113.150.000	103.050.300	97.925.000	95,03

Kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	466.200.000	524.450.000	519.050.697	98,97
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	26.187.500	8.400.000	8.260.000	98,33
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>10.196.320.000</b>	<b>8.678.517.500</b>	<b>8.598.022.442</b>	<b>99,07</b>
Kegiatan penyusunan data base tenaga kerja daerah	207.520.000	135.350.500	132.867.057	98,17
Pembangunan balai latihan kerja	9.002.800.000	6.880.076.000	6.852.074.000	99,59
Kegiatan pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja	173.494.000	364.211.200	362.952.200	99,65
Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	383.405.000	878.695.000	839.544.785	95,54
Kegiatan operasional BLK	429.101.000	420.184.800	410.584.400	97,72
<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>791.272.100</b>	<b>433.621.650</b>	<b>432.157.660</b>	<b>99,66</b>
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	0	78.880.000	78.869.741	99,99
Kegiatan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	346.960.100	202.710.100	201.853.698	99,58
Kegiatan JOB Market Fair (JMF) / Pameran Bursa Kerja	266.580.000	70.909.550	70.827.655	99,88
Kegiatan pemagangan dalam negeri	177.732.000	81.122.000	80.606.566	99,36
<b>Program Transmigrasi Lokal</b>	<b>392.296.500</b>	<b>82.345.000</b>	<b>80.050.699</b>	<b>97,21</b>

Kegiatan penyuluhan transmigrasi lokal	159.158.000	67.945.000	67.245.699	98,97
Kegiatan pelatihan transmigrasi lokal	233.138.500	14.400.000	12.805.000	88,92
<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketanagakerjaan</b>	<b>999.750.000</b>	<b>581.050.600</b>	<b>563.128.848</b>	<b>96,92</b>
Kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketanagakerjaan	201.150.000	75.698.500	75.489.000	99,72
Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	220.435.000	128.012.000	124.542.300	97,29
Kegiatan penyusunan kebijakan standarisasi lembagi penyalur tenaga kerja	65.700.000	16.280.000	16.079.800	98,77
Kegiatan pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	52.500.000	28.363.800	28.103.800	99,08
Kegiatan kampanye bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	394.965.000	286.596.300	273.417.148	95,40
Kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	65.000.000	46.100.000	45.496.800	98,69

Selain dana APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kabupaten Balangan juga mendapat bantuan anggaran APBN sebesar Rp. 1.318.620.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.227.655.361,-. Dana tersebut digunakan untuk mendanai pendidikan keterampilan sebanyak 12 paket, antara lain :

1. Pelatihan Menjahit sebanyak 4 Paket
2. Pelatihan Otomotif Roda 2 sebanyak 1 Paket
3. Pelatihan Instalasi Lisrik sebanyak 1 Paket
4. Pelatihan Las Listrik sebanyak 1 Paket

5. Pelatihan Basic Office sebanyak 3 Paket
6. Pelatihan Desain Grafis sebanyak 2 Paket

Adapun pencapaian indikator kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningatnya angkatan kerja yang bekerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	80,60%	97,54%	121
2	Menurunnya kasus perselisihan dan kecelakaan kerja	Angka perselisihan hubungan industrial	4 Kasus	9 Kasus	-25
		Angka kecelakaan kerja	3 Kasus	7 Kasus	-33,33
3	Meningkatnya pendapatan warga transmigrasi	Pendapatan warga transmigrasi per tahun	1.800.000	2.000.000	111,11
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai/predikat akuntabilitas kinerja	BB	-	-
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	-	-
<b>No.      Sasaran Program      Indikator Kinerja      Target      Realisasi      %</b>					
1	Meningkatnya pencari kerja yang terampil	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat keterampilan	22%	49,93%	226,95
2	Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang diserap pada bursa kerja	7%	21,54%	307,71
4	Penguatan kelembagaan hubungan industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Lembaga Bipartit	85%	100%	125,00

5	Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan wajib lapor	80%	64,28%	80,35
6	Berkembangnya kawasan transmigrasi	Persentase lahan yang dikelola warga transmigrasi	18,82%	18,76%	99,68
7	Meningkatnya warga transmigrasi yang terampil	Persentase warga transmigrasi yang terampil	70%	60%	85,71
8	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,00
9	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%	100,00
10	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	100%	100,00
11	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	100,00
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Nilai LAKIP Disnakertrans	BB	-	-
13	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100,00
		Persentase penyerapan anggaran	100%	97,05%	97,05



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	Persentase kehadiran peserta pelatihan kewirausahaan	100%	100%	100,00
2	Terlaksananya kegiatan pameran bursa kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti pameran bursa kerja	3 Perusahaan	3 Perusahaan	100,00
3	Tersedianya database ketenagakerjaan	Jumlah dokumen database ketenagakerjaan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
4	Terlaksananya pemagangan dalam negeri	Persentase peserta magang yang mendapat predikat memuaskan	65%	72,73%	111,89
5	Tersusunnya informasi bursa kerja	Jumlah dokumen informasi bursa kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
6	Tersedianya sarana dan prasarana BLK	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BLK	100%	100%	100,00
7	Terlaksananya diklat keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta diklat yang memiliki sertifikat keterampilan	112 Orang	128 Orang	114,29
8	Terlaksananya pelayanan BLK yang bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat (Peserta Diklat)	90%	85%	94,44
9	Tersedianya penyediaan operasional BLK	Jumlah bulan penyediaan operasional BLK	12 Bulan	12 Bulan	100,00
10	Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan	Persentase kehadiran peserta sosialisasi yang diundang	100%	25%	25,00
11	Tersusunnya dokumen standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah dokumen standarisasi ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
12	Termonitornya kinerja PJTKI	Persentase PJTKI yang dimonitor	50%	50%	100,00

13	Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus hasil penyelesaian perselisihan hubungan	5 Kasus	9 Kasus	180,00
14	Termonitornya perusahaan yang menerapkan norma kerja	Persentase perusahaan yang dimonitor	38,8%	38,8%	100,00
15	Terlaksananya kampanye bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah peserta/ perusahaan yang berpartisipasi dalam kampanye bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	28 Perusahaan	28 Perusahaan	100,00
17	Terlaksananya koordinasi lintas sektor pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	100,00
18	Tersedianya sarana prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah sarana prasarana yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00
19	Terlaksananya monev sarana prasarana lingkungan transmigrasi	Jumlah laporan hasil monev	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
20	Terbinanya masyarakat transmigrasi	Frekuensi penyuluhan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	100,00
		Persentase kehadiran peserta pelatihan yang diundang	100%	0%	0,00
22	Tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	Nilai komponen perencanaan pada LKIP DISNAKERTRANS	BB	-	-
		Nilai komponen pelaporan pada LKIP DISNAKERTRANS	BB	-	
		Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00

23	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	24 Orang	30 Orang	125,00
24	Tersusunnya data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah pelayanan surat menyurat	2000 Surat	2.823 Surat	141,15
		Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	29 Orang	29 Orang	100,00
25	Tersedianya sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100,00

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2021 disajikan di tabel T-C.29 pada lampiran.

## 2.2 Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah

### 2.2.1 Capaian Kinerja DPMPTSP

**Tabel 2.2 Capaian Kinerja DPMPTSP**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	47,25 M	216 M	458,13 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	86 %	88,50 %	103 %

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja Kabupaten Balangan Tahun 2020**

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Capaian	Kategori
I	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
II	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
III	$66\% \leq 75\%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65\%$	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*Dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja DPMPTSP telah tercapai dan berhasil dilaksanakan dinyatakan “**sangat tinggi**” yaitu capaiannya rata-rata  $91\% \leq 100\%$  dari target. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1**

**Meningkatnya Investasi Daerah**

**Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator 1**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	47,25 M	216,47 M	458,13 %	Sangat Tinggi

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) tahun 2020 sesuai dengan tabel 2.4 sebagai berikut : Jumlah nilai investasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2020 sebagaimana tabel 2.4 adalah sebesar 216,47 Milyar Jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya (2019) dengan realisasi 27,99 Milyar, hal ini berarti ada kenaikan pada pencapaian di tahun 2020 yakni sebesar 188, 45 Milyar.

**Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Nilai PMDN**

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	62,18 %	47,25 M	216,47 M	458,13 %	388,35 %
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>458, 13 %</b>	<b>388,35 %</b>

- a. Jika dibandingkan capaian kinerja indikator pertumbuhan nilai penanaman modal dalam negeri tahun 2020 dengan capaian akhir RPJMD tahun 2021 sebagaimana tabel 2.5 maka sudah mencapai angka 388,35 %.
- b. Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2020 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM adalah sebesar Rp 216.466.323.218,00 (Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2019 Realisasi investasinya sebesar Rp 27.988.279.555,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Disini terjadi mengalami kenaikan sebesar atau 395,95 % dari tahun 2019.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi**

Berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM tahun 2020 sebanyak 29 pelaku usaha berarti sudah 43.28% dari total 67 pelaku usaha yang terdaftar di tahun 2020. Sedangkan realisasi investasi dari 29 pelaku usaha pada tahun 2020 sebesar Rp. 216,47 Milyar. Target pencapaian kinerja ini diambil berdasarkan hasil realisasi investasi yang sudah dilaporkan oleh pelaku usaha pada aplikasi LKPM online yang sudah

disetujui oleh BKPM. Penyampaian LKPM ini dilakukan secara mandiri oleh setiap pelaku usaha setiap triwulan atau 3 bulan sekali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pencapaian realisasi investasi PMDN ini adalah sebagai berikut :

- a. PT. Surya Satria Timur yang bergerak dibidang kayu lapis telah menjual asetnya sebesar Rp. 139 milyar dan dijadikan modal tetap perusahaan. Penjualan aset ini dilakukan untuk membayar gaji karyawan sehingga menjadi realisasi investasi pada modal tetap perusahaan.
- b. Adanya perusahaan tambang yang melakukan pembebasan lahan untuk melakukan penambangan. Hal ini membuat realisasi penanaman modal pada modal tetap perusahaan menjadi lebih besar.
- c. Beberapa perusahaan yang pada tahun 2019 melakukan ijin perluasan usahanya telah melaksanakan pekerjaannya
- d. Jumlah perusahaan yang mendaftarkan NIB nya pada periode pelaporan triwulan IV yaitu pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2019 seperti CV. An Nur, CV Ulin Berseri dan, CV. Annisa Permai yang mendaftar pada bulan Desember 2019, perusahaan ini melaporkan LKPM nya pada triwulan I tahun 2020.
- e. Strategi “Jemput Bola” (datang secara langsung ke tempat pelaku usaha) yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam upaya meningkatkan realisasi penanaman modal mempunyai dampak yang signifikan. Banyak pelaku usaha yang memberikan data realisasi penanaman modalnya untuk dilaporkan dalam aplikasi LKPM Online. Hal ini dilakukan pelaku usaha karena banyak diantara pelaku usaha yang belum memahami bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi LKPM Online tersebut.

### **Permasalahan/Hambatan**

1. Kendala internal
  - Secara kuantitas, Sumber Daya Manusia yang ada sangat kurang untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
  - Kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia yang ada dalam penguasaan Informasi dan Teknologi Komputer.

- Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan secara langsung.

## 2. Kendala eksternal

- Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban mereka dalam menyampaikan LKPM.
- Pelaku usaha masih kurang memahami dalam menggunakan aplikasi LKPM online
- Sulitnya menghubungi pelaku usaha karena nomor yang didaftarkan untuk mengurus NIB kadang tidak aktif.
- Tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah daerah bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM.
- Pada tahun 2020 jumlah rencana investasi tidak dapat direalisasikan semua karena pelaku usaha hanya dapat menyampaikan realisasi investasinya terhitung 3 bulan setelah terbitnya NIB mereka, dan nilai realisasi yang akan dilaporkanpun tidak dapat semuanya karena jika mereka melaporkan semuanya maka untuk periode selanjutnya mereka harus melakukan ijin perluasan ataupun ijin produksi.
- Beberapa pelaku usaha perumahan yang memiliki rencana investasi besar pada tahun 2019 sudah direalisasikan semuanya sehingga pada tahun 2020 mereka hanya menambahkan rencana investasi untuk perluasan lahan sehingga rencana investasinya tidak terlalu besar.

### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada untuk lebih bekerja keras mengumpulkan dan mengolah data yang terdapat dalam LKPM.
2. Melakukan survey langsung ke Perusahaan yang tidak melakukan entry data LKPM dan mendorong perusahaan supaya melaksanakan entry data LKPM terhadap jumlah investasi yang telah dilakukan.
3. Meminta data yang diperlukan untuk dilakukan entry data LKPM di Dinas DPMPSTSP. (Strategi jemput bola).

4. Perlu melakukan rasionalisasi mekanisme perhitungan capaian nilai investasi penanaman modal dalam negeri disamping penguatan pada sektor pendataan agar indikator yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

## Sasaran 2

### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Tabel 2.6 Sasaran dan Indikator 2

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	86 % (A)	88.50 % (A)	103 %	Sangat Tinggi

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan tahun 2020 sesuai dengan tabel 2.6 sebagai berikut:

- Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan tahun 2020 sebagaimana tabel 3.5 adalah sebesar 103 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) mencapai angka 111,38 %, hal ini berarti ada penurunan pada pencapaian di tahun 2020 yakni sebesar 8,38 %.
- Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan dapat dikatakan sangat tinggi.

Tabel 2.7 Capaian dan Indikator IKM

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	111.38 %	86 % (A)	88,50% (A)	103 %	101,72 %
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>103 %</b>	<b>101,72 %</b>



- a. Jika dibandingkan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan dengan capaian akhir RPJMD tahun 2021 sebagaimana tabel 2.7 maka sudah mencapai angka 101,72 %.
- b. Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2020 yang di dapat dari Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 88,50% (A). Sedangkan untuk tahun 2019 Realisasi nilai IKM sebesar 93 % (A). Disini terjadi penurunan nilai IKM sebesar 4,5 %. Penurunan nilai IKM ini melebihi dari target Renstra DPMPTSP tahun 2016-2021 sebesar 86 %.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Secara keseluruhan nilai IKM ini terlihat dari unsur pelayanan sangat baik tapi masih perlu ditingkatkan dari segi pelayanan, kemampuan dari front liner Ruang pelayanan telah sesuai dengan standar kenyamanan dan fasilitas ruang pelayanan, telah terdapat ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang tunggu yang dilengkapi dengan pendingin ruangan yang baik, ruang membaca, dan plakat-plakat informasi mengenai pelayanan, serta telah dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti ram dan handling.

### **Permasalahan/Hambatan**

Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengisian kuesioner indeks kepuasan masyarakat, dan sebagian ada yang tidak mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh petugas pelayanan.

### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
2. Kinerja personil petugas pelayanan dipertahankan dengan melakukan Bimtek Excelent service dalam hal pelayanan personil sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab petugas pelayanan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran

yang ditetapkan dalam penetapan kinerja DPMPTSP Kabupaten Balangan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Balangan Tahun 2019-2020 dapat dilihat dalam tabel TC-30 pada lampiran.

### **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Balangan**

Tugas DPMPTSP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada DPMPTSP, Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
3. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Dengan adanya krisis ekonomi global berakibat terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada daerah dan kurang promosi potensi unggulan daerah dikarenakan pembangunan infrastruktur di daerah belum optimal. Sumber daya manusia untuk pengembangan sistem informasi sangat diperlukan dengan menyelenggarakan diklat di bidang IT, sedangkan untuk koordinasi data dengan dinas terkait faktor yang mempengaruhinya adanya perusahaan yang tidak melaporkan rencana investasinya dengan tidak melakukan pendaftaran penanaman modal dan perlu adanya kepastian hukum untuk calon investor.

## **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2021 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu :

### **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif

Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan kami tampilkan dalam bentuk tabel T-C.31 pada lampiran.

#### **2.2.2 Capaian Kinerja DISNAKERTRANS**

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2020 (tahun berjalan).

**TABEL 2.4 T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten**  
**Balangan sampai tahun 2020 (tahun berjalan) Kabupaten Balangan**

No.	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proye ksi  Tahun 2021	Cata tan Anal isis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1.	Ketenaga kerjaan		Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/ buruh	3.005 orang	3.100 orang	3.200 orang	3.300 orang	100%	96,16 %	96,16 %	100%	100%	
			Pencari kerja yang ditempatkan	1.690 orang	1.750 orang	1.800 orang	1.900 orang	87,02 %	83,82 %	64,25 %	90%	90%	
2.	Transmigr asi		Transmigran swakarsa	33 KK	33 KK	33 KK	50 KK	16,5%	16,5%	16,5%	25%	25%	

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa hasil realisasi capaian IKK Tahun 2020 Indikator Ketenagakerjaan yaitu mengenai pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebesar 96,16%. Hasil ini diperoleh dari perbandingan Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif sebanyak 2.931 orang dengan Jumlah pekerja/buruh sebanyak 3.048 orang di kali 100%. Dan mengenai pencari kerja yang ditempatkan, yang mana realisasi capaian kerjanya untuk tahun 2020 sebesar 64,25%. Hasil pencapaian tersebut diperoleh dari hasil perbandingan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan yaitu sebanyak 453 orang dengan Jumlah pencari kerja yang mendaftar yaitu 705 orang di kali 100%.

Dan mengenai Indikator Transmigrasi terlihat hasil realisasi capaian IKK tentang Transmigran Swakarsa untuk tahun 2020 adalah sebesar 16,5%. Hasil capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan tidak ada melakukan kerjasama dalam hal penerimaan transmigran. Adapun transmigran swakarsa yang ada di Kabupaten Balangan sebanyak 33 orang dari 200 transmigran yang ada.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut capaian kinerja IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan pada tahun 2020 :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian Kinerja
Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	80,60%	97,54%	121,02%	Sangat Tinggi
Menurunnya kasus perselisihan dan kecelakaan kerja	Angka perselisihan hubungan industrial	4 Kasus	9 Kasus	-25%	Sangat Rendah
	Angka kecelakaan kerja	3 Kasus	7 Kasus	-33,33%	Sangat Rendah
Meningkatnya pendapatan warga transmigrasi	Pendapatan warga transmigrasi per tahun	1.800.000	2.000.000	111,11%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pengolahan keuangan dan kinerja	Nilai/predikat akuntabilitas kinerja	BB	-	-	-
	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	-	-	-

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari tabel sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan ada 2 (dua) indikator yang telah memenuhi target dengan kategori capaian “**Sangat Tinggi**” dan 2 (dua) indikator belum tercapai dengan kategori capaian “**Sangat Rendah**”. Selain itu ada 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator yang belum dapat terukur capaian kinerjanya. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya evaluasi LKIP 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan dan evaluasi Laporan Keuangan oleh Tim BPK.

### **Urusan Ketenagakerjaan :**

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa dari indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan yaitu Persentase angkatan kerja yang bekerja dengan target di tahun 2020 sebesar 80,60% dan realisasi yang dicapai 97,54%. Dari hasil realisasi tersebut hasil capaian kinerja untuk indikator persentase angkatan kerja yang bekerja sebesar 121,02% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi** (di atas 100%). Hasil capaian tersebut berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 70.928 jiwa berbanding dengan jumlah angkatan kerja sebesar 72.717 jiwa. Dan jumlah bukan angkatan kerja pada tahun 2020 yang sebesar 22.341 jiwa. Dalam hal ini capaian kinerja sudah melebihi target yang sudah ditetapkan.

Untuk indikator yang kedua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan untuk tahun 2020 target kinerja angka perselisihan hubungan industrial sebanyak 4 Kasus dengan realisasi sebesar 9 Kasus. Dari hasil realisasi tersebut maka capaian kinerja untuk indikator angka perselisihan hubungan industrial sebesar -25% dengan kategori penilaian **Sangat Rendah**.

Sedangkan untuk indikator yang ketiga angka kecelakaan kerja target yang ditetapkan sebanyak 3 Kasus, dengan realisasi sebanyak 7 Kasus, sehingga tingkat capaiannya -33,33% dengan kategori penilaian **Sangat Rendah**.

### **Urusan Ketransmigrasian :**

Berdasarkan data dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian indikator yang keempat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan yaitu Pendapatan warga transmigrasi per tahun untuk tahun 2020 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000,00 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,00 Dari hasil realisasi tersebut dapat diukur hasil capaian kinerja dengan persentase kinerja sebesar 111,11% dengan kategori penilaian **Sangat Tinggi** (di atas 100%).

## **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup :

### **Urusan Wajib :**

- a. Pengentasan pengangguran;
- b. Peningkatan tenaga kerja terampil;
- c. Peningkatan daya saing tenaga kerja daerah;
- d. Wilayah transmigrasi yang berdaya saing dan mandiri ekonomi;
- e. Pelatihan keterampilan kerja yang merupakan pekerjaan nasional bersifat lintas sektoral, pusat dan daerah, dan antardaerah melalui kegiatan reorientasi, revitalisasi dan pemenuhan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebijakan nasional;
- f. Peningkatan efektifitas informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja khusus serta memperluas kesempatan kerja melalui model padat karya dan inkubasi bisnis;
- g. Peningkatan efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui evaluasi peraturan-peraturan daerah yang teridentifikasi menimbulkan kemelut dan peningkatan profesionalisme serikat pekerja/buruh;
- h. Peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan melalui pemberian fasilitas bagi usaha ekonomi informal agar menjadi formal serta pembinaan tentang perlindungan tenaga kerja dan syarat-syarat kerja kepada pengusaha-pengusaha ekonomi informal;
- i. Pengawasan ketenagakerjaan dengan indikator besaran pemeriksaan perusahaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adapun isu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah :

### **Urusan Tenaga Kerja**

#### **A. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

B. Penempatan Tenaga Kerja

1. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota
2. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.

C. Hubungan Industrial

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota
2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

Perihal mengenai Tabel T-C.31 tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Balangan dan Tabel T-C.32 tentang Form Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2020 Yang Ter Verifikasi Dan Dapat Diakomodir Di Renja 2021 dapat dilihat pada bagian lampiran.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu dari fungsi strategis penyelenggaraan pemerintah, fungsi strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satu instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan yang perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat dikerja dan perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang disusun di gunakan untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai modal dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu yang cepat dan biaya transparan. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

Selaras dengan agenda pembangunan Nasional, arah kebijakan dan strategi pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi pembangunan Nasional, pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan wilayah. Adapun urusan-urusan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu:

### **1. Urusan Ketenagakerjaan**

- a. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- b. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan
- c. Optimalisasi kerjasama dengan perusahaan penerima tenaga kerja
- d. Meningkatkan informasi lowongan kerja
- e. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja

### **2. Urusan Transmigrasi**

- a. Pembinaan masyarakat Transmigrasi Lokal
- b. Meningkatkan sarana prasarana di kawasan transmigrasi
- c. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar sector dan antar pelaku dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

## **Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Permendagri No 40 Tahun 2020**

### **Prioritas Bidang Pembangunan Nasional**

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian

### **Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

1. Meningkatkan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan sasaran dalam penerapan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan tidaklah lepas dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 yang ada pada Misi II dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif dan Misi IV yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Adapun tujuan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah

1. Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja
3. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi daerah;
2. Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

### **Target Pembangunan Nasional**

- a. Nilai realisasi penanaman modal Rp 991,3 triliun;
- b. Nilai realisasi penanaman modal sector sekunder;
- c. Perusahaan besar yang bermitra dengan usaha mikro, kecil menengah : 120 perusahaan;
- d. Sebaran penanaman modal yang berkualitas (di luar Jawa) : 46,9%;
- e. Nilai komitmen hasil promosi investasi terfokus sektor dan negara : Rp 1.652,2 triliun;
- f. Kontribusi investasi dalam negeri/ PMDN termasuk usaha mikro, kecil menengah; 47,8 %;
- g. Peringkat kemudahan berusaha: 55 (Peringkat EoDB).

### **Hal – Hal yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2022**

- a. Pengawasan realisasi investasi di daerah.
- b. Perlunya hilirisasi sumber daya alam di daerah.
- c. Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional khususnya usaha mikro, kecil menengah di daerah proyek.
- d. Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja.
- e. Mendorong investasi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.
- f. Promosi investasi terfokus berdasarkan sector dan yang sejalan dengan prioritas nasional.
- g. Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/ PMDN khususnya usaha mikro, kecil menengah.
- h. Penyederhanaan Perizinan di daerah.

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar publik/investor
2. Memutus rantai “perantara/calor” dalam pengurusan perizinan dan non perizinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat

untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah waktu penyelesaian yang cepat dan biaya yang transparan.

3. Peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan pelayanan prima untuk memujudkan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelayanan yang ramah mudah cepat dan transparan serta tanggapan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang di terima masyarakat.
5. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan selaras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Balangan. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas/Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasii pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan kompetensi integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
7. Pembinaan/ pengawasan dan monev.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

### **3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSPTTK Tahun 2022**

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Salah satu faktor yang jadi pertimbangan dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan di tahun 2022 adalah melanjutkan visi dan misi dari kepala daerah yaitu Terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumberdaya manusia ,melalui misi mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sehingga dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan tersebut lebih difokuskan pada penajaman IKU ( Indikator Kinerja Utama) Daerah berupa peningkatan investasi daerah.

Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan merencanakan sebanyak 22 kegiatan yang terdiri dari 59 Sub Kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
  - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - Sub Kegiatan**
      - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
      - Sub Kegiatan**
        - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**

**Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub Kegiatan**

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

**A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan**

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

**B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan**

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

**3. Program Promosi Penanaman Modal**



**A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan**

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

**A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

**Sub Kegiatan**

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

**5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

**A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

**A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**  
**Sub Kegiatan**

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

**7. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

**A. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**  
**Sub Kegiatan**

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

**8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

**A. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**  
**Sub Kegiatan**

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- 3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

**B. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**  
**Sub Kegiatan**

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

**C. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**  
**Sub Kegiatan**

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

**9. Program Penempatan Tenaga Kerja**

**A. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**  
**Sub Kegiatan**

- 1) Pelayanan antar Kerja
- 2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- 3) Perluasan Kesempatan Kerja

## **10. Program Hubungan Industrial**

### **A. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

#### **Sub Kegiatan**

- 1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

### **B. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

#### **Sub Kegiatan**

- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

### **A. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

#### **Sub Kegiatan**

- 1) Penyuluhan Transmigrasi

## **12. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

### **A. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**

#### **Sub Kegiatan**

- 1) Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
- 2) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENANAMAN DAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2022 terdiri dari:

#### **Program Utama:**

##### **1. Program Promosi dan Kerjasama Investasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalinnya kerjasama pengusaha PMDN dan PMA terdatanya jumlah perusahaan PMDN dan PMA juga terlaksananya promosi investasi dan memperkenalkan produk unggulan daerah.

##### **2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Program ini bertujuan untuk memenuhi proses perizinan dengan cepat, transparan dan akuntabel serta terpeliharanya jaringan hardware dan website.

#### **Program Penunjang:**

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel T-C.33 di lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan diharapkan Tupoksi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten dan dapat mendukung pencapaian Target PAD Tahun 2022.

# LAMPIRAN

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)\*  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar : .....

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	100; 100; 100; 100; 76	100; 100; 100; 100; 69.67	100; 100; 100; 100; 76	100; 100; 100; 100; 69.75	91,78%	100; 100; 100; 100; 75
				Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik						

2	18	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</b>	43	25	9	9	100%	10	44	102%
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	0	0	0	0	0%	3	3	0%
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase RKA - SKPD DPMPSTP yang baik	22	14	4	4	100%	4	22	100%
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang baik	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase DPA - SKPD yang baik	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang baik	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	21	11	5	5	100%	3	19	90%
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi	0	0	0	0	0%	0	0	0%



						kinerja perangkat daerah yang baik											
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	12	12	12	12	100%	12	12				100%
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	72	48	14	14	100%	14	76				106%
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	72	48	12	12	100%	12	72				100%
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	0	0	0	0	0%	0	0				0%
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	0	0	0	0	0%	0	0				0%
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0	0	0%	0	0				0%
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	0	0	0	0	0%	0	0				0%

2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan	230 ; 170	140 ; 114	45 ; 40	45 ; 40	100% ; 100%	43 , 45	228 ; 199	99.13 % ; 117.06%
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72	74	24	24	100%	20	118	164%
2	18	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95	105	46	46	100%	70	221	233%
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13	10	6	6	100%	5	21	162%
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	31.092	97.902	67.451	67.451	100%	318	165.671	533%

2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	349	528	390	390	100%	78	996	285%
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>163%</b>
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	7	4	0	0	0%	1	5	71%
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	23	37	5	5	100%	2	44	191%
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	48	12	12	100%	12	72	100%

2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	4	3	3	3	100%	4	4	100%
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi	72	48	12	12	100%	0	60	83%
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>1, Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha2, Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan</b>								
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>1. Jumlah Perda dan Perbup mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2.jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian</b>								

						<b>Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>								
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4	2	1	1	100%	1	4	100%
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	02	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>								
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4	2	1	1	100%	1	4	100%
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12	2	2	2	100%	1	5	42%

2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi								
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi 3. Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati 4. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi								
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	9	3	1	0	0%	2	5	56%
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP; 2. Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Izin yang diterbitkan ; 2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelayanan yang harus Dilaksanakan; 3. Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan;								

						<b>4.Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan</b>								
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	2200	1.087	600	1.112	185%	600	2799	127%
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dievaluasi	100	50	100	113	113%	100	263	263%
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	100	100	100	100	100%	100	100	100%

2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>											
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	4	2	1	1	100%	1	4	100%			
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	400	303	0	0	0%	100	403	101%			
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	40	31	11	23	209%	12	66	165%			
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>			
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>			
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. Jumlah Data Penanaman Modal yang Tersedia; 3. Jumlah Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan ; 4. Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	13 ;	1 ; 1 ;	1 ;		#VALUE!	7 ; 6 ; 2 ; 8	#VALUE!	#VALUE!			



Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kabupaten Balangan	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>71 (BB)</b>	<b>8.245.689.300,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kabupaten Balangan	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>71 (BB)</b>	<b>9.075.603.900,00</b>	
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	<b>90%</b>				Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	<b>90%</b>		
I	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>92.248.000,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>101.280.000,00</b>	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	100%	12.404.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	100%	11.900.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase RKA - SKPD DPMPTSP yang baik	100%	13.624.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase RKA - SKPD DPMPTSP yang baik	100%	13.124.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang baik	100%	6.684.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang baik	100%	6.184.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase DPA - SKPD yang baik	100%	10.904.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase DPA - SKPD yang baik	100%	10.404.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang baik	100%	6.684.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang baik	100%	6.184.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	100%	35.264.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	100%	47.300.000,00	

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	100%	6.684.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	100%	6.184.000,00
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>7.180.106.900,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>7.289.058.100,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	6.894.449.300,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	6.894.449.300,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	244.737.600,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	358.320.000,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	100%	8.184.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	100%	7.684.000,00

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	8.184.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	7.684.000,00
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Balangan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	8.184.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Balangan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	7.684.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	8.184.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	7.684.000,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	8.184.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	5.552.800,00
III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>179.640.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>281.900.000,00</b>

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan	50 stell, 50 stell	49.720.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan	50 stell, 50 stell	37.500.000,00	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	129.920.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	244.400.000,00	
IV	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>210.389.100,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>263.381.400,00</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84 buah	8.480.100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80 buah	20.205.400,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 buah	21.650.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 buah	10.000.000,00	

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	262 pak ; 40,000 lembar	29.468.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	262 pak ; 40,000 lembar	35.616.000,00	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 bahan bacaan	4.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 bahan bacaan	4.000.000,00	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	182 orang/hari	146.791.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	182 orang/hari	193.560.000,00	
V	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8 buah, 1 paket</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8 buah, 1 paket</b>	-	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 buah	60.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 buah	-	

2	Pengadaan Mebel	Kabupaten Balangan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	6 buah	5.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Balangan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	6 buah	-	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 paket	10.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 paket	-	
VI	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>260.875.300,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>707.394.400,00</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	0,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	145.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	383.100.000,00	

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	109.275.300,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	324.294.400,00	
VII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>247.430.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>432.590.000,00</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	190.750.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	324.350.000,00	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	100%	56.680.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	100%	108.240.000,00	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi					Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi		-	



B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	1, Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha 2, Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	1. 2 Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha ; 2. 1 Potensi Investasi Daerah	75.030.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	1, Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha 2, Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	1. 2 Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha ; 2. 1 Potensi Investasi Daerah	62.370.000,00	
I	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Perda dan Perbup mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2.jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Perda, 1 Perbup, 1 Dokumen Evaluasi	47.810.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Perda dan Perbup mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2.jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Perda, 1 Perbup, 1 Dokumen Evaluasi	36.300.000,00	
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20%	47.810.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	20%	36.300.000,00	

								Penanaman Modal			
2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 laporan monitoring Evaluasi	0,00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 laporan monitoring Evaluasi	0,00	
II	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>1. Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen Review RUPM ; 1 Dokumen Peta Potensi</b>	<b>27.220.000,00</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>1. Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen Review RUPM ; 1 Dokumen Peta Potensi</b>	<b>26.070.000,00</b>	
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Review RUPM	12.500.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Review RUPM	11.850.000,00	

2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen Peta Potensi	14.720.000,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen Peta Potensi	14.220.000,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi</b>	<b>200 M</b>	<b>85.900.000,00</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi</b>	<b>200 M</b>	<b>65.640.000,00</b>
I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi 3. Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati 4. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	1.2 investor; 2. 5 item ; 3. 1 Laporan ; 4. 2 Kegiatan	85.900.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi 3. Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati 4. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	1.2 investor ; 2. 5 item ; 3. 1 Laporan ; 4. 2 Kegiatan	65.640.000,00
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi	1. 2 investor; 2. 5 item	31.520.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi	1. 2 investor; 2. 5 item	16.650.000,00

2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	1. 1 Laporan ; 2. 2 Kegiatan	54.380.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	1. 1 Laporan ; 2. 2 Kegiatan	48.990.000,00
D	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>1.Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP; 2. Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP</b>	<b>100% ; 100 %</b>	<b>155.700.000,00</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>1.Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP; 2. Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP</b>	<b>100% ; 100 %</b>	<b>133.400.000,00</b>
I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Izin yang diterbitkan ; 2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelayanan yang harus Dilaksanakan; 3. Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan; 4.Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	1. 700 izin ; 2. 12 kegiatan ; 3. 100 %; 4.100 %	155.700.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Izin yang diterbitkan ; 2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelayanan yang harus Dilaksanakan ; 3. Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan; 4.Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	1. 700 izin ; 2. 12 kegiatan ; 3. 100 %; 4.100 %	133.400.000,00

1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	100%	39.890.000,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	100%	14.000.000,00
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Persentase Izin yang dievaluasi	100%	31.850.000,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Persentase Izin yang dievaluasi	100%	22.490.000,00
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Balangan	Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan	100%	43.600.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Balangan	Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan	100%	52.050.000,00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	100%	40.360.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	100%	44.860.000,00
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>132.900.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>95.830.000,00</b>

1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	<b>100 Milyar</b>	<b>132.900.000,00</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	<b>100 Milyar</b>	<b>95.830.000,00</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	100 Laporan	25.750.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	100 Laporan	14.520.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	25 Perusahaan	64.900.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	25 Perusahaan	31.210.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	25 Perusahaan	42.250.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	25 Perusahaan	50.100.000,00
F	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>129.100.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>145.910.000,00</b>
I	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>129.100.000,00</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>145.910.000,00</b>

1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. Jumlah Data Penanaman Modal yang Tersedia; 3. Jumlah Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan ; 4. Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	1. 3 Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. 1 Data Penanaman Modal ; 3. 6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 4. 1 Dokumen Informasi Penanaman Modal	129.100.000,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. Jumlah Data Penanaman Modal yang Tersedia; 3. Jumlah Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan ; 4. Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	1. 3 Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. 1 Data Penanaman Modal ; 3. 6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 4. 1 Dokumen Informasi Penanaman Modal	145.910.000,00	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>1.220.130.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>2.588.869.600</b>	
<b>G</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		<b>Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		<b>Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja</b>	<b>30%</b>	<b>121.422.000</b>	<b>Catatan Penting</b>

I	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</b>			<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</b>	1 dok	121.422.000	12
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan	1 dok	121.422.000	
H	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi</b>	4%	964.975.000	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi</b>	4%	1.878.645.100	
I	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		<b>Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi</b>	13,87%	681.000.000	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		<b>Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi</b>	13,87%	1.701.975.100,00	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	BLK Kab. Balangan	Jumlah paket pelatihan klaster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan	2 paket pelatihan / 32 orang	681.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	BLK Kab. Balangan	Jumlah paket pelatihan klaster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan	1 paket pelatihan / 16 orang	321.668.750,00	



								memiliki keterampilan			
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	BLK Kab. Balangan	Jumlah MoU dengan pihak ketiga			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	BLK Kab. Balangan	Jumlah MoU dengan pihak ketiga	3 paket pelatihan	225.000.000,00	
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	BLK Kab. Balangan	Persentase Pemenuhan Sarana Pelatihan BLK			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	BLK Kab. Balangan	Persentase Pemenuhan Sarana Pelatihan BLK	100%	1.155.306.350,00	
II	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Jumlah LPKS (kejuruan) terakreditasi</b>	<b>3 LPK</b>	<b>283.975.000</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Jumlah LPKS (kejuruan) terakreditasi</b>	<b>3 LPK</b>	<b>92.970.000</b>	
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah LPKS terakreditasi	3 LPK	283.975.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah LPKS terakreditasi	3 LPK	92.970.000	
Juml LKPS terdaftar di OSS/memiliki izin			10 LPK	Juml LKPS terdaftar di OSS/memiliki izin				10 LPK			
Juml lulusan LPKS yang kompeten			100 org	Juml lulusan LPKS yang kompeten				100 org			

Pagu anggaran sebagian dialihkan utk belanja listrik, air, internet dan gaji honor

III	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>Jumlah pelaku usaha kecil yang mengikuti konsultasi peningkatan produktivitas</b>			<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>Jumlah pelaku usaha kecil yang mengikuti konsultasi peningkatan produktivitas</b>	<b>20 orang</b>	<b>83.700.000</b>
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Balangan	Jumlah peserta konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Balangan	Jumlah orang/Pelaku perusahaan kecil, mikro dan Menengah	20 orang	83.700.000
J	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Presentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri</b>	<b>65%</b>	<b>130.155.000</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Presentase Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>65%</b>	<b>222.122.500</b>
I	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja</b>	<b>1500 orang</b>	<b>130.155.000</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja</b>	<b>1500 orang</b>	<b>222.122.500</b>
1	Pelayanan antar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantaraan kerja	750 orang	130.155.000	Pelayanan antar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantaraan kerja	750 orang	124.532.500
2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Balangan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Balangan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan	5 orang	38.195.000

3	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Balangan	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirausaha Baru			Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Balangan	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirausaha Baru	20 orang	59.395.000
<b>K</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi</b>	<b>90%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi</b>	<b>90%</b>	<b>366.680.000</b>
<b>I</b>	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</b>	<b>10%</b>	<b>60.000.000</b>	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</b>	<b>10%</b>	<b>110.620.000</b>
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah dokumen informasi sarana HI setiap tahun	1 dok	60.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah dokumen informasi sarana HI setiap tahun	1 dok	110.620.000
Jumlah pembinaan aturan ketenagakerjaan			3 kali	Jumlah pembinaan aturan				3 kali		

			Jumlah monitoring perusahaan	5 kali				ketenagakerjaan			
								Jumlah monitoring perusahaan	5 kali		
II	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi</b>	<b>80%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi</b>	<b>80%</b>	<b>256.060.000</b>	
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pembinaan pencegahan PHI	1 kali	40.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pembinaan pencegahan PHI	2 kali	216.850.000	
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah kasus PHI yang difasilitasi	3 Kasus	25.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah kasus PHI yang difasilitasi	3 Kasus	39.210.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				<b>250.000.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				<b>226.457.000</b>	

L	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase fasilitas satuan permukiman yang dibangun</b>		<b>53.080.000</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase fasilitas satuan permukiman yang dibangun</b>		<b>0</b>
I	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah warga non Transmigrasi menjadi warga transmigras</i>	<i>2 KK</i>	<i>53.080.000</i>	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah warga non Transmigrasi menjadi warga transmigras</i>		<i>0</i>
1	Penyuluhan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah frekuensi Kegiatan Penyuluhan	2 KK	53.080.000	Penyuluhan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah frekuensi Kegiatan Penyuluhan		0
M	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi</b>	<b>18,91%</b>	<b>196.920.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi</b>	<b>18,91%</b>	<b>226.457.000</b>
I	<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>		<i>Luas Lahan yang dapat dikelola oleh warga transmigrasi di kawasan transmigrasi</i>	<i>64.30 ha</i>	<i>196.920.000</i>	<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>		<i>Luas Lahan yang dapat dikelola oleh warga transmigrasi di kawasan transmigrasi</i>	<i>64.30 ha</i>	<i>226.457.000,00</i>

1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah frekuensi kegiatan Penguatan SDM	1 Kali	88.044.000	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah frekuensi kegiatan Penguatan SDM	2 Kali	50.730.000,00
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	2 Paket	108.876.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	2 Paket	175.727.000,00
<b>Total Pagu</b>					<b>10.294.449.300,00</b>					<b>12.394.080.500,00</b>

Tabel T - C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Balangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
			Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kabupaten Balangan					DPMPTSP		
2	18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Kabupaten Balangan					DPMPTSP		

2	18	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>71 (BB)</b>	<b>9.075.603.900,00</b>				<b>9.529.384.095,00</b>
						Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		<b>90%</b>				<b>90%</b>	-
2	18	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>101.280.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>106.344.000,00</b>
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	Kabupaten Balangan	100%	11.900.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	12.495.000,00
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase RKA - SKPD DPMPTSP yang baik	Kabupaten Balangan	100%	13.124.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	13.780.200,00



2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang baik	Kabupaten Balangan	100%	6.184.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	6.493.200,00
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase DPA - SKPD yang baik	Kabupaten Balangan	100%	10.404.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	10.924.200,00
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang baik	Kabupaten Balangan	100%	6.184.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	6.493.200,00
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	Kabupaten Balangan	100%	47.300.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	49.665.000,00
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	Kabupaten Balangan	100%	6.184.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	6.493.200,00
2	18	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>7.289.058.100,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>7.653.511.005,00</b>
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	6.894.449.300,00	APBD	DPMPTSP	100%	7.239.171.765,00

2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Kabupaten Balangan	100%	358.320.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	376.236.000,00
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	Kabupaten Balangan	100%	7.684.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	8.068.200,00
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	7.684.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	8.068.200,00
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Balangan	100%	7.684.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	8.068.200,00
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	7.684.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	8.068.200,00
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	5.552.800,00	APBD	DPMPTSP	100%	5.830.440,00
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>281.900.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>295.995.000,00</b>

2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan	Kabupaten Balangan	50 stell, 50 stell	37.500.000,00	APBD	DPMPTSP	50 stell, 50 stell	39.375.000,00
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	100%	244.400.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	256.620.000,00
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>263.381.400,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>276.550.470,00</b>
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	84 buah	20.205.400,00	APBD	DPMPTSP	90 buah	21.215.670,00
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Balangan	3 buah	10.000.000,00	APBD	DPMPTSP	10 buah	10.500.000,00
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Balangan	262 pak ; 40,000 lembar	35.616.000,00	APBD	DPMPTSP	244 pak ; 50,000 lembar	37.396.800,00
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kabupaten Balangan	2 bahan bacaan	4.000.000,00	APBD	DPMPTSP	3 bahan bacaan	4.200.000,00
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	182 orang/hari	193.560.000,00	APBD	DPMPTSP	252 orang/hari	203.238.000,00

2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>8 buah, 1 paket</b>	-	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>8 buah, 1 paket</b>	-
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Kabupaten Balangan	2 buah	-	APBD	DPMPTSP	4 buah	-
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Kabupaten Balangan	6 buah	-	APBD	DPMPTSP	2 buah	-
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Kabupaten Balangan	1 paket	-	APBD	DPMPTSP	2 buah, 1 paket	-
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>707.394.400,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>12 bulan</b>	<b>742.764.120,00</b>
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Balangan	12 bulan	0,00	APBD	DPMPTSP	12 bulan	-
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	100%	383.100.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	402.255.000,00
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	12 bulan	324.294.400,00	APBD	DPMPTSP	12 bulan	340.509.120,00

2	18	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>432.590.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>12 bulan</b>	<b>454.219.500,00</b>
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	Kabupaten Balangan	100%	324.350.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	340.567.500,00
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	Kabupaten Balangan	100%	108.240.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	113.652.000,00
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi	Kabupaten Balangan		-	APBD	DPMPTSP		-
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>1, Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha2, Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>1. 2 Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha ; 2. 1 Potensi Investasi Daerah</b>	<b>62.370.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>1. 2 Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha ; 2. 1 Potensi Investasi Daerah</b>	<b>65.488.500,00</b>

2	18	02	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Jumlah Perda dan Perbup mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b> <b>2.jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	Kabupaten Balangan	1 Perda, 1 Perbup, 1 Dokumen Evaluasi	36.300.000,00	APBD	DPMPTSP	1 Perbup, 1 Dokumen Evaluasi	38.115.000,00
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	20%	36.300.000,00	APBD	DPMPTSP	20%	38.115.000,00
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	1 laporan monitoring Evaluasi	0,00	APBD	DPMPTSP	APBD	-
2	18	02	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>2. Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	1 Dokumen Review RUPM ; 1 Dokumen Peta Potensi	26.070.000,00	APBD	DPMPTSP	1 Dokumen Review RUPM ; 1 Dokumen Peta Potensi	27.373.500,00
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1 Dokumen Review RUPM	11.850.000,00	APBD	DPMPTSP	1 Dokumen Review RUPM	12.442.500,00

2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1 Dokumen Peta Potensi	14.220.000,00	APBD	DPMPTSP	1 Dokumen Peta Potensi	14.931.000,00
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>200 M</b>	<b>65.640.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>210 M</b>	<b>68.922.000,00</b>
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi 3. Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati 4. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	Kabupaten Balangan	1.2 investor; 2. 5 item ; 3. 1 Laporan ; 4. 2 Kegiatan	65.640.000,00	APBD	DPMPTSP	1.2 investor; 2. 5 item ; 3. 1 Laporan ; 4. 2 Kegiatan	68.922.000,00
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi	Kabupaten Balangan	1. 2 investor; 2. 5 item	16.650.000,00	APBD	DPMPTSP	1. 2 investor 2. 5 item	17.482.500,00

2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	Kabupaten Balangan	1. 1 Laporan ; 2. 2 Kegiatan	48.990.000,00	APBD	DPMPTSP	1. 1 Laporan ; 2. 2 Kegiatan	51.439.500,00
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP; 2. Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100% ; 100 %</b>	<b>133.400.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100% ; 100 %</b>	<b>140.070.000,00</b>
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Izin yang diterbitkan ; 2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelayanan yang harus Dilaksanakan; 3. Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan; 4.Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Balangan	1. 700 izin ; 2. 12 kegiatan; 3. 100 %; 4.100 %	133.400.000,00	APBD	DPMPTSP	1. 700 izin ; 2. 12 kegiatan; 3. 100 %; 4.100 %	140.070.000,00
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	Kabupaten Balangan	100%	14.000.000,00	APBD	DPMPTSP	100%	14.700.000,00



2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dievaluasi	Kabupaten Balangan	100%	22.490.000,00	APBD	DPMPPTSP	100%	23.614.500,00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan	Kabupaten Balangan	100%	52.050.000,00	APBD	DPMPPTSP	100%	54.652.500,00
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	Kabupaten Balangan	100%	44.860.000,00	APBD	DPMPPTSP	100%	47.103.000,00
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>95.830.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>100.621.500,00</b>
2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100 Milyar</b>	<b>95.830.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPPTSP</b>	<b>110 Milyar</b>	<b>100.621.500,00</b>
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	100 Laporan	14.520.000,00	APBD	DPMPPTSP	100 Laporan	15.246.000,00

2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	Kabupaten Balangan	25 Perusahaan	31.210.000,00	APBD	DPMPTSP	25 Perusahaan	32.770.500,00
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	Kabupaten Balangan	25 Perusahaan	50.100.000,00	APBD	DPMPTSP	20 Perusahaan	52.605.000,00
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>145.910.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>153.205.500,00</b>
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>145.910.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>153.205.500,00</b>

2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. Jumlah Data Penanaman Modal yang Tersedia; 3. Jumlah Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan ; 4. Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	1. 3 Data Perizinan dan Non Perizinan; 2. 1 Data Penanaman Modal ; 3. 6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 4. 1 Dokumen Informasi Penanaman Modal	145.910.000,00	APBD	DPMPSTP	1. 3 Data Perizinan dan Non Perizinan; 2. 1 Data Penanaman Modal ; 3. 6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 4. 1 Dokumen Informasi Penanaman Modal	153.205.500,00
2	07	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja</b>		<b>100%</b>	<b>121.422.000,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS	<b>100%</b>	<b>127.493.100,00</b>
2	07	02	2,01		<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</i>		<b>100%</b>	<b>121.422.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>127.493.100,00</b>
2	07	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan		121.422.000,00	APBD	DISNAKERTRANS		127.493.100,00
2	07	03			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi</b>		6 paket pelatihan/ 96 orang	<b>1.878.645.100,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS	6 paket pelatihan/ 96 orang	<b>1.972.577.355,00</b>
2	07	03	2,01		<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klater kompetensi</i>			<b>1.701.975.100,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS		<b>1.787.073.855,00</b>

2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah paket pelatihan kluster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan	BLK Kab. Balangan	<b>3 Lembaga</b>	321.668.750,00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>3 Lembaga</b>	337.752.187,50
2	07	03	2,01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MoU dengan pihak ketiga	BLK Kab. Balangan	<b>5 Kejuruan</b>	225.000.000,00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>5 Kejuruan</b>	236.250.000,00
2	07	03	2,01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana Pelatihan BLK	BLK Kab. Balangan	<b>10 Instruktur</b>	1.155.306.350,00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>10 Instruktur</b>	1.213.071.667,50
2	07	03	2,02		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah LPKS (kejuruan) terakreditasi</b>		3 Dokumen	<b>92.970.000,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS	3 Dokumen	<b>97.618.500,00</b>
2	07	03	2,02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS terakreditasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan		92.970.000,00	APBD	DISNAKERTRANS		97.618.500,00
					Juml LKPS terdaftar di OSS/memiliki izin	<b>75%</b>							
					Juml lulusan LPKS yang kompeten	<b>75%</b>							
2	07	03	2,04		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah pelaku usaha kecil yang mengikuti konsultasi peningkatan produktivitas</b>		<b>1500 orang</b>	<b>83.700.000,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS	<b>1500 orang</b>	<b>87.885.000,00</b>

2	07	03	2,04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah orang/Pelaku perusahaan kecil, mikro dan Menengah	Kab. Balangan	100 lowongan	83.700.000,00	APBD	DISNAKERTRANS	100 lowongan	87.885.000,00
2	07	04			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Presentase Penempatan Tenaga Kerja</b>		1500 orang	<b>222.122.500,00</b>	<b>APBD</b>	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>1500 orang</b>	<b>233.228.625,00</b>
2	07	04	2,01		<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja</i>		1500 orang	<b>222.122.500,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS	1500 orang	<b>233.228.625,00</b>
2	07	04	2,01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantaraan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	40 orang	124.532.500,00	APBD	DISNAKERTRANS	40 orang	130.759.125,00
2	07	04	2,01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan	Kab. Balangan	40 orang	38.195.000,00	APBD	DISNAKERTRANS	40 orang	40.104.750,00
2	07	04	2,01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirausaha Baru	Kab. Balangan	5 orang	59.395.000,00	APBD	DISNAKERTRANS	5 orang	62.364.750,00
2	07	05			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi</b>		20 orang	<b>366.680.000,00</b>				<b>385.014.000,00</b>

2	07	05	2,01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</b>		5 LPTKS/BKK	<b>110.620.000,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS	5 LPTKS/BKK	<b>116.151.000,00</b>
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi sarana HI setiap tahun Jumlah pembinaan aturan ketenagakerjaan Jumlah monitoring perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	<b>100%</b>	110.620.000,00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>100%</b>	<b>116.151.000,00</b>
2	07	05	2,02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi</b>		<b>50%</b>	<b>256.060.000,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS	<b>50%</b>	<b>268.863.000,00</b>
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pencegahan PHI	Kab. Balangan	<b>90%</b>	216.850.000,00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>90%</b>	<b>227.692.500,00</b>
2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHI yang difasilitasi	Kab. Balangan	<b>2 Perusahaan</b>	39.210.000,00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>2 Perusahaan</b>	<b>41.170.500,00</b>
													-
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				<b>226.457.000,00</b>				<b>237.779.850,00</b>

3	32	03			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase fasilitas satuan permukiman yang dibangun</b>		1 Dokumen	-	APBD	DISNAKERTRANS	1 Dokumen	-
3	32	03	2,01		<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah warga non Transmigrasi menjadi warga transmigras</i>							-
3	32	03	2,01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah frekuensi Kegiatan Penyuluhan							-
													-
3	32	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentasi Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi</b>		3 Kasus	<b>226.457.000,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS	3 Kasus	<b>237.779.850,00</b>
3	32	04	2,01		<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>	<i>Luas Lahan yang dapat dikelola oleh warga transmigrasi di kawasan transmigrasi</i>			<b>226.457.000,00</b>	APBD	DISNAKERTRANS		<b>237.779.850,00</b>
3	32	04	2,01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah frekuensi kegiatan Penguatan SDM	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan		50.730.000,00	APBD	DISNAKERTRANS		53.266.500,00
3	32	04	2,01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan		175.727.000,00	APBD	DISNAKERTRANS		184.513.350,00
													-
<b>JUMLAH</b>									<b>12.394.080.500,00</b>				<b>13.013.784.525,00</b>





3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	389,600,000.00	100%	267,000,000.00	100%	42,500,000.00	50.00%	20,000,000	0	0	0	0	50.00%	22,500,000.00	100.00%	42,500,000.00	100.00%	100.00%	100%	309,500,000	100.00%	79.44%	DPMPTSP	Rata-rata realisasi kinerja mencapai 100 %			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (stall)	230	186,700,000.00	140	140,500,000.00	45	22,500,000.00	0	0	0	0	0	0	45	22,500,000.00	45	22,500,000.00	100.00%	100.00%	185	163,000,000	80.43%	87.31%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 100%			
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI (stall)	63	28,000,000.00	38	19,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00			38	19,000,000	60.32%	67.86%	DPMPTSP				
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stall)	190	91,700,000.00	85	50,500,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00			85	50,500,000	44.74%	55.07%	DPMPTSP				
	Pengadaan pakaian kedarahan	Tersedianya pakaian kedarahan (stall)	170	83,200,000.00	114	57,000,000.00	40	20,000,000.00	40	20,000,000	0	0	0	0	0	-	40	20,000,000.00	100.00%	100.00%	154	77,000,000	90.59%	92.55%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 100%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100.00%	100.00%	115.5	77375000	69.02%	75.76%		
Predikat kinerja																						SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SEDANG	SEDANG		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1,236,535,000.00	100%	617,784,730.00	100%	145,000,000.00	25.00%	30,000,000.00	33.33%	42,250,000.00	0.00%	-	41.67%	72,400,000.00	100%	144,650,000.00	100%	99.76%	100%	762,434,730	100.00%	61.66%	DPMPTSP	Rata-rata realisasi kinerja mencapai 100 %			
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan (kegiatan)	16	201,685,000.00	16	201,685,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	16	201,685,000	100.00%	100.00%	DPMPTSP				
	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan(OK)	72	1,034,850,000.00	74	416,099,730.00	24	145,000,000.00	6	30,000,000.00	8	42,250,000.00	0	0	10	72,400,000.00	24	144,650,000.00	100%	99.76%	98	560,749,730	136.11%	54.19%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 100%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100.00%	99.76%	98	560749730	118.06%	77.09%		
Predikat kinerja																						SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja SKPD	100%	258,730,000.00	100%	234,416,637.00	100%	28,173,000.00	44.44%	3,290,400.00	22.22%	11,949,600.00	0.00%	0.00	33.33%	12,933,000.00	100.00%	28,173,000.00	100.00%	100.00%	100%	262,583,637	100.00%	101.49%	DPMPTSP	Rata-rata realisasi kinerja mencapai 100%			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan (dokumen)	21	194,200,000.00	11	195,930,637.00	5	14,001,000.00	3	1,495,900.00	1	4,984,100.00	0	0.00	1	7,521,000.00	5	14,001,000.00	100.00%	100.00%	16	209,931,637	76.19%	108.10%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 100%			
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA DPMPTSP (dokumen)	22	64,530,000.00	14	38,480,000.00	4	14,172,000.00	1	1,794,500.00	1	6,965,500.00	0	0.00	2	5,412,000.00	4	14,172,000.00	100.00%	100.00%	18	52,652,000	81.82%	81.59%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 100%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100.00%	100.00%	100	262583637	79.00%	94.85%		
Predikat kinerja																						SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	TINGGI	SANGAT TINGGI		
6	Meningkatnya Investasi Daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha yang ditindaklanjuti	100%	1,651,888,500.00	100%	430,177,154.00	100%	1,493,072,000.00	0%	-	0%	29,737,000.00	80%	143,840,700.00	20%	1,295,517,300.00	100%	1,469,095,000.00	100.00%	98.39%	100%	1,899,272,154	100.00%	114.96%	DPMPTSP	Rata-rata realisasi kinerja mencapai 175 %		
	Peningkatan Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Terciptanya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah (Mou)	4	129,020,000.00	2	55,284,898.00	1	31,388,000.00	0	0.00	0	2,777,000.00	2	1,158,000.00	3	27,453,000.00	7	31,388,000.00	700.00%	100.00%	9	86,672,898	225.00%	67.18%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 500%			
	Pengembangan potensi unggulan daerah	Terlaksananya Ekspose tentang Potensi Unggulan Daerah (kegiatan)	12	297,150,000.00	2	27,540,000.00	2	1,352,924,000.00	0	0.00	0	0	1	142,682,700.00	1	1,186,734,300.00	2	1,329,417,000.00	100.00%	98.26%	4	1,356,957,000	33.33%	456.66%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 100%			
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tersusunnya RUPM dan Perbup Tata Cara Pemberian Insentif Kemudahan Berinvestasi di Daerah (dokumen)	4	534,949,500.00	2	148,849,200.00	1	56,300,000.00	0	0.00	0	0	0	0	1	54,830,000.00	1	54,830,000.00	100.00%	99.15%	3	203,679,200	75.00%	38.07%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 100%			
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Pelaksanaan Pameran Investasi (kegiatan)	9	690,769,000.00	3	196,503,056.00	1	53,460,000.00	0	0.00	0	26,960,000.00	0	0	1	26,500,000.00	0	53,460,000.00	0.00%	100.00%	3	251,963,056	33.33%	36.48%	DPMPTSP	47% (kinerja sampai tahap menyiapkan bahan kegiatan pameran investasi, Realisasi Pameran tidak Dapat dilaksanakan )			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						225.00%	99.35%			91.67%	149.60%		
Predikat kinerja																						SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	TINGGI	SANGAT TINGGI		
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM (%)	100%	2,705,590,000.00	100%	883,310,875.00	100%	95,371,400.00	0%	0	84.62%	27,061,000.00	5.00%	0	10.38%	67175400	100.00%	94,236,400.00	100.00%	98.81%	100%	977,547,275	100.00%	36.13%	DPMPTSP	Rata-rata realisasi kinerja mencapai 136.36%			
	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Tersedianya Draft NSPK (dokumen)	0	-	0	-	0	0.00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0.00			0	0	0.00%	0.00%	DPMPTSP					
	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Terlaksananya Sosialisasi tentang Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (kegiatan)	1	24,450,000.00	1	24,450,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			1	24,450,000	100.00%	100.00%	DPMPTSP				
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal (dokumen)	4	635,240,000.00	2	202,789,458.00	1	59,050,000.00	0	0	0	0	0	0	1	58,300,000.00	1	58,300,000.00	100.00%	98.73%	3	261,089,458	75.00%	41.10%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 100%			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Realisasi Investasi (dokumen)	4	162,135,000.00	2	45,895,000.00	1	11,946,400.00	0	0	0	10,371,000.00	0	0	1	1,575,400.00	1	11,946,400.00	100.00%	100.00%	3	57,841,400	75.00%	35.67%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 100%			
	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Jumlah Laporan Tim (kegiatan)	3	347,220,000.00	4	347,220,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			4	347,220,000	133.33%	100.00%	DPMPTSP				
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM (Perusahaan)	40	1,067,585,000.00	31	150,228,749.00	11	24,375,000.00	0	0	11	16,690,000.00	6	0	6	7,300,000.00	23	23,990,000.00	209.09%	98.42%	54	174,218,749	135.00%	16.32%	DPMPTSP	Realisasi kinerja mencapai 209.09%			

	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha di Bidang Investasi	Jumlah Pelaku Usaha (sasaran) yang menerima sosialisasi (Pelaku Usaha)	400	468.960.000,00	303	112.727.668,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	303	112.727.668	75,75%	24,04%	DPMPTSP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	136,36%	99,05%	99,75%	151469318	99,01%	52,86%					
Predikat kinerja																	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH					
8	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah sektor potensi sumber daya investasi (sektor)	100%	509.872.500,00	100%	285.708.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%	285.708.700	100%	56,04%	DPMPTSP				
	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Dokumen Kajian Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	1	270.900.000,00	1	270.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	270.900.000	100%	100,00%	DPMPTSP				
	Penyusunan Profil Potensi Sumber Daya Investasi	Tersedianya Dokumen Profil Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	4	238.972.500,00	0	14.808.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	14.808.700	0%	6,20%	DPMPTSP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%	0,5	142834350	30,00%	33,10%					
Predikat kinerja																	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	RENDAH					
9	PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DATA PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	683.300.000,00	100%	290.688.803,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%	290.688.803	100%	43%	DPMPTSP				
	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online (paket)	2	58.250.000,00	2	65.111.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	2	65.111.071	100%	12%	DPMPTSP				
	Remediasi dan Pengembangan Sistem Informasi Teknologi	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan dan Pengembangan Informasi Teknologi (IT) (aplikasi)	1	17.500.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DPMPTSP				
	Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Tersedianya Bahan Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (paket)	1	107.550.000,00	1	225.577.732,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	225.577.732	100%	210%	DPMPTSP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%	1	96996267,67	66,67%	73,80%					
Predikat kinerja																	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SEDANG	SEDANG					
10	PROGRAM PENATAAN NSPK BIDANG PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Sinkronisasi dan Harmonisasi NSPK	100%	340.725.000,00	100%	379.345.649,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%	379.345.649	100%	111,33%	DPMPTSP				
	Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Naskah Akademik NSPK (NSPK)	1	206.600.000,00	1	206.049.649,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	206.049.649	100%	99,73%	DPMPTSP				
	Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Terlaksananya Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (kegiatan)	8	106.625.000,00	8	141.796.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	8	141.796.000	100%	132,99%	DPMPTSP				
	Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang Didokumentasikan (NSPK)	6	27.500.000,00	6	31.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	6	31.500.000	100%	114,55%	DPMPTSP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%	5	126448549,7	100,00%	115,75%					
Predikat kinerja																	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI					
11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	110.045.000,00	100%	81.986.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%	81.986.500	100%	74,50%	DPMPTSP				
	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey dan Tersusunnya Dokumen IKM (dokumen)	1	30.365.000,00	1	29.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	29.800.000	100%	98,14%	DPMPTSP				
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	Pengaduan Masyarakat yang Ditangani dan Terselesaikan (%)	100	79.680.000,00	100	52.186.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	52.186.500	100%	65,50%	DPMPTSP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00%	0,00%	50,5	40993250	100,00%	81,82%					
Predikat kinerja																	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI					
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100%	1.768.485.200,00	100%	381.064.433,00	100%	62.431.000,00	51,13%	19.108,000	32,25%	7.740,000	8,00%	0	8,62%	30.980.900,00	100%	57.828.900,00	100%	92,63%	100%	438.893.333	100,00%	24,82%	DPMPTSP	Rata-rata realisasi kinerja mencapai 91 %
	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Jumlah Izin Yang diterbitkan (Buah)	2200	370.669.000,00	1.087	61.930.000,00	600	37.800.900,00	366	15.000,000	222	7.740,000	223	0	301	15.060.900,00	1112	37.800.900,00	185,33%	100,00%	2,199	99.730.900	99,95%	26,91%	DPMPTSP	Jumlah Izin yang sudah diterbitkan 1112 izn atau capaian 185,33%	
	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100	711.597.300,00	100	233.558.100,00	100	18.070.100,00	25	4.108,000	25	0	25	0	25	10.960.000,00	100	15.068.000,00	100%	83,39%	100	248.626.100	100,00%	34,94%	DPMPTSP	Tercapai 2 kali, telah disusun 2 SK Tim Teknis dan Pembina PTSP Kabupaten dgn Nomor 188.45/130/Kum Tahun 2020 dan SK Tim Pembina PTSP Nomor 188.45/129/Kum Tahun 2020 , Rapat dilaksanakan 2 kali	





	2	12	1	06	03	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan(OK)	72	1,034,850,000.00	74	416,099,730.00	24	145,000,000.00	6	30,000,000.00	8	42,250,000.00	0	0	10	72,400,000.00	24	144,650,000.00	100%	99.76%	98	560,749,730	136.11%	54.19%	DPMTFSP	Realisasi kinerja mencapai 100%																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100.00%	99.76%	98	560,749,730	136.90%	77.89%																												
Predikat kinerja																								SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI																												
6		2	12	1	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akurabilitas dan Kinerja SKPD	100%	258,738,000.00	100%	234,410,637.00	100%	28,173,000.00	44%	3,290,400.00	22%	11,949,600.00	33%	0.00																																						
		2	12	1	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Terusunnya Renja, Renja Perubahan, LAKAS, LPPD, Laporan Keuangan (dokumen)	21	194,200,000.00	11	195,930,637.00	5	14,001,000.00	3	1,495,900.00	1	4,984,100.00	1	0.00																																					
		2	12	1	06	05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Terusunnya RKA dan DPA DPMTFSP (dokumen)	22	64,530,000.00	14	38,480,000.00	4	14,172,000.00	1	1,794,500.00	1	6,965,500.00	2	0.00																																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																												
Predikat kinerja																								SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI																												
6	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	2	12	1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pembangunan Dunia Usaha yang ditingkatkan	100%	1,651,888,500.00	100%	436,177,154.00	100%	1,493,072,000.00	0%	0	0%	29,737,000.00	80%	143,840,700.00	20%	1,295,517,300.00	100%	1,469,095,000.00	100.00%	98.39%	100%	1,899,272,154	100.00%	114.98%	DPMTFSP	Rata-rata realisasi kinerja mencapai 175 %																										
		2	12	1	15	01	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Terciptanya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah (KOU)	4	129,020,000.00	2	55,284,898.00	1	31,388,000.00	0	0.00	0	2,777,000.00	2	1,158,000.00	3	27,453,000.00	7	31,388,000.00	700.00%	100.00%	9	86,672,898	225.00%	67.18%	DPMTFSP	Realisasi kinerja mencapai 500%																									
		2	12	1	15	02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Terlaksananya Ekspose tentang Potensi Unggulan Daerah (kegiatan)	12	297,150,000.00	2	27,540,000.00	2	1,352,924,000.00	0	0.00	0	0	1	142,882,700.00	1	1,186,734,300.00	2	1,329,417,000.00	100.00%	98.26%	4	1,356,957,000	33.33%	456.66%	DPMTFSP	Realisasi kinerja mencapai 100%																									
		2	12	1	15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terusunnya RUPM dan Perbup Tata Cara Pemberian Insentif Kemudahan Berinvestasi di Daerah (dokumen)	4	534,949,500.00	2	148,849,200.00	1	55,300,000.00	0	0.00	0	0	0	54,830,000.00	1	54,830,000.00	100.00%	99.15%	3	203,679,200	75.00%	38.07%	DPMTFSP	Realisasi kinerja mencapai 100%																											
		2	12	1	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Pelaksanaan Pameran Investasi (kegiatan)	9	690,769,000.00	3	198,503,056.00	1	53,460,000.00	0	0.00	0	26,960,000.00	0	0	1	26,500,000.00	0	53,460,000.00	0.00%	100.00%	3	251,963,056	33.33%	36.48%	DPMTFSP	47% (kinerja sampai tahap menyiapkan bahan kegiatan pameran investasi. Realisasi Pameran tidak Dapat dilaksanakan )																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																								225.00%	99.35%	100%	100.00%	100.00%	100.00%																												
Predikat kinerja																								SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI																												
7		2	12	1	16	Program Peningkatan Ilim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Perusahaan yang menyempatkan LKPM (%)	100%	2,705,598,000.00	100%	883,310,875.00	100%	95,371,400.00	0%	0	84.62%	27,061,000.00	5.00%	0	10.38%	67175400	100.00%	94,236,400.00	100.00%	98.81%	100%	977,547,275	100.00%	36.13%	DPMTFSP	Rata-rata realisasi kinerja mencapai 136.36%																										
		2	12	1	16	01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Tersedianya Draft NSRP (dokumen)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%																												
		2	12	1	16	02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Verifikasinya Sosialisasi tentang insentif dan Kemudahan Berinvestasi (kegiatan)	1	24,450,000.00	1	24,450,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	24,450,000	100.00%	100.00%																														
		2	12	1	16	05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal (dokumen)	4	635,240,000.00	2	202,789,458.00	1	59,050,000.00	0	0	0	0	0	1	58,300,000.00	1	58,300,000.00	100.00%	98.73%	3	261,089,458	75.00%	41.10%	DPMTFSP	Realisasi kinerja mencapai 100%																										
		2	12	1	16	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Realisasi Investasi (dokumen)	4	162,135,000.00	2	45,895,000.00	1	11,946,400.00	0	0	0	10,371,000.00	0	1	1,575,400.00	1	11,946,400.00	100.00%	100.00%	3	57,841,400	75.00%	35.67%	DPMTFSP	Realisasi kinerja mencapai 100%																										
		2	12	1	16	10	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Jumlah Laporan Tin (kegiatan)	3	347,220,000.00	4	347,220,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4	347,220,000	133.33%	100.00%																														
		2	12	1	16	11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyempatkan LKPM (Perusahaan)	40	1,067,585,000.00	31	150,228,749.00	11	24,375,000.00	0	0	11	16,690,000.00	6	0	6	7,300,000.00	23	23,990,000.00	209.09%	98.42%	54	174,218,749	135.00%	16.32%	DPMTFSP	Realisasi kinerja mencapai 209.09%																									
		2	12	1	16	13	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha di Bidang Investasi	Jumlah Pelaku Usaha (asasari) yang menerima sosialisasi (Pelaku Usaha)	400	468,960,000.00	303	112,727,668.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	303	112,727,668	75.75%	24.04%	DPMTFSP																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																								136.36%	99.65%	90.75	151469318.8	99.01%	52.96%																												
Predikat kinerja																								SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH																												
8		2	12	1	17	Program Penyajian Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah sektor potensi sumber daya investasi (sektor)	100%	509,972,500	100%	285,708,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%	285,708,700	100%	56.04%	DPMTFSP																										
		2	12	1	17	01	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan investasi	Dokumen Kajian Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	1	270,900,000	1	270,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	270,900,000	100%	100.00%	DPMTFSP																											
		2	12	1	17	02	Penyusunan Profil Potensi Sumber Daya Investasi	Tersedianya Dokumen Profil Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	4	238,972,500	0	14,808,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	14,808,700	0%	6.20%	DPMTFSP																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0.00%	0.00%	0.6	142854396	60.00%	63.19%																												
Predikat kinerja																								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	RENDAH																												
9		2	12	1	19	PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN DATA PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	683,300,000	100%	296,688,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%	296,688,803	100%	43%	DPMTFSP																											
		2	12	1	19	01	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online (paket)	2	558,250,000	2	65,111,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	2	65,111,071	100%	12%	DPMTFSP																											



2	12	1	28	06	Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (Kegiatan)	24	420,701,000.00	8	51,065,000.00	2	16,531,600.00	0	0.00	0	0	0.00	2	16,531,600.00	2	16,531,600.00	100.00%	100.00%	10	33,063,200	41.67%	7.86%	DPMP/TSP	Realisasi kinerja mencapai 100%						
2	12	1	28	07	Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang didokumentasikan (NSPK)	18	158,218,000.00	6	28,000,000.00	6	19,999,800.00	0	0.00	0	0	0.00	24	19,999,800.00	24	19,999,800.00	400.00%	100.00%	30	39,999,600	166.67%	25.28%	DPMP/TSP	Realisasi kinerja mencapai 100%						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						200.00%	96.73%	7.2857143	4347042.86	89.07%	16.91%								
Predikat kinerja																						SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT RENDAH								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							3,330,446,200.00	2	309,740,713.00	2	404,989,937.00	2	288,785,922.00	2	2,279,883,307	9	3,275,399,879																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 14)																						100.00%	97.79%			100.00%	65.46%								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 14)																						SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	RENDAH								
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dengan Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik minat investor</p> <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih ada beberapa jenis perizinan yang belum dilayani di PTSP</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana berikutnya:</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana SKPD tahun berikutnya:</p>																																			

Disusun  
..... tanggal.....  
KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Disetujui  
..... tanggal.....  
BUPATI/WALIKOTA  
KABUPATEN/KOTA.....

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)\* Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	100; 100; 100; 100; 76	100; 100; 100; 100; 69.67	100; 100; 100; 100; 76	100; 100; 100; 100; 69.75	91.78%	100; 100; 100; 100; 75				
				Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik										
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	43	25	9	9	100%	10	44	102%	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	0	0	0	0%	3	3	0%	
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase RKA - SKPD DPMPSTP yang baik	22	14	4	4	100%	4	22	100%
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang baik	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase DPA - SKPD yang baik	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Persentase Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang baik	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	21	11	5	5	100%	3	19	90%
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	12	12	12	12	100%	12	12	100%	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	72	48	14	14	100%	14	76	106%
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	0	0	0	0	0%	0	0	0%



2	18	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan	230 ; 170	140 ; 114	45 ; 40	45 ; 40	100% ; 100%	43 , 45	228 ; 199	99.13 % ; 117.06%
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72	74	24	24	100%	20	118	164%
2	18	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95	105	46	46	100%	70	221	233%
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13	10	6	6	100%	5	21	162%
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	31,092	97,902	67,451	67,451	100%	318	165,671	533%
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349	528	390	390	100%	78	996	285%
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>163%</b>
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	7	4	0	0	0%	1	5	71%
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	23	37	5	5	100%	2	44	191%
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang diadakan	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	4	3	3	3	100%	4	4	100%
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	72	48	12	12	100%	12	72	100%
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi	72	48	12	12	100%	0	60	83%

2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	1. Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha 2. Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk diromosikan.												
2	18	02	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1. Jumlah Perda dan Perbup mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal												
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4	2	1	1	100%	1	4	100%				
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
2	18	02	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	1. Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota												
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4	2	1	1	100%	1	4	100%				
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12	2	2	2	100%	1	5	42%				
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi												
2	18	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi 3. Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati 4. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi												
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	9	3	1	0	0%	2	5	56%				
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	1. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP; 2. Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100	100	100	100	100%	100	100	100%				
2	18	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	1. Jumlah Izin yang diterbitkan ; 2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelayanan yang harus Dilaksanakan; 3. Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan; 4. Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan												
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	2200	1,087	600	1,112	185%	600	2799	127%				
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dievaluasi	100	50	100	113	113%	100	263	263%				
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan	100	100	100	100	100%	100	100	100%				
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	100	100	100	100	100%	100	100	100%				

2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Nilai Realisasi Investasi								
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	4	2	1	1	100%	1	4	100%
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	400	303	0	0	0%	100	403	101%
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	40	31	11	23	209%	12	66	165%
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. Jumlah Data Penanaman Modal yang Tersedia; 3. Jumlah Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan ; 4. Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	13;	1; 1;	1;		#VALUE!	7; 6; 2; 8	#VALUE!	#VALUE!

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Balangan**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah)		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah)			973 M	1,021 T		1,6 T	973 M	1,021 T	
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (rupiah)		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (rupiah)	45 M	47,25 M	227,29 M	238,65 M		216,47 M	227,29 M	238,65 M	
3	Persentase Jenis Perizinan yang telah ber SOP		Persentase Jenis Perizinan yang telah ber SOP	100%	100%	100%	100%		49%	100%	100%	

Tabel T-C.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kabupaten Balangan	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>71 (BB)</b>	<b>8,245,689,300.00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kabupaten Balangan	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>71 (BB)</b>	<b>9,075,603,900.00</b>	
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	90%				Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	90%		
I	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>92,248,000.00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>101,280,000.00</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	100%	12,404,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	100%	11,900,000.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase RKA - SKPD DPMPTSP yang baik	100%	13,624,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase RKA - SKPD DPMPTSP yang baik	100%	13,124,000.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang baik	100%	6,684,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang baik	100%	6,184,000.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase DPA - SKPD yang baik	100%	10,904,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase DPA - SKPD yang baik	100%	10,404,000.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang baik	100%	6,684,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang baik	100%	6,184,000.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	100%	35,264,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	100%	47,300,000.00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	100%	6,684,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	100%	6,184,000.00	
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>7,180,106,900.00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>7,289,058,100.00</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	6,894,449,300.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	6,894,449,300.00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	244,737,600.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	358,320,000.00	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	100%	8,184,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	100%	7,684,000.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	8,184,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	7,684,000.00	
5	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Balangan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	8,184,000.00	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Balangan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	7,684,000.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	8,184,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	7,684,000.00	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	8,184,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Balangan	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	5,552,800.00	
III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>179,640,000.00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>281,900,000.00</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan	50 stel, 50 stel	49,720,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan	50 stel, 50 stel	37,500,000.00	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	129,920,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	244,400,000.00	
IV	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>210,389,100.00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>263,381,400.00</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84 buah	8,480,100.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80 buah	20,205,400.00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 buah	21,650,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 buah	10,000,000.00	

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	262 pak ; 40,000 lembar	29,468,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	262 pak ; 40,000 lembar	35,616,000.00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 bahan bacaan	4,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 bahan bacaan	4,000,000.00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	182 orang/hari	146,791,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	182 orang/hari	193,560,000.00
V	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8 buah, 1 paket</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8 buah, 1 paket</b>	-
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 buah	60,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 buah	-
2	Pengadaan Mebel	Kabupaten Balangan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	6 buah	5,000,000.00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Balangan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	6 buah	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 paket	10,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 paket	-
VI	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>260,875,300.00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>707,394,400.00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	0.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	145,600,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	383,100,000.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	109,275,300.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	324,294,400.00
VII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>247,430,000.00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Balangan	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>432,590,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	190,750,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	324,350,000.00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	100%	56,680,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	100%	108,240,000.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi					Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi		-
8	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>1, Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha 2, Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan</b>	<b>1. 2 Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha ; 2. 1 Potensi Investasi Daerah</b>	<b>75,030,000.00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Balangan	<b>1, Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha 2, Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan</b>	<b>1. 2 Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha ; 2. 1 Potensi Investasi Daerah</b>	<b>62,370,000.00</b>
I	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>1, Jumlah Perda dan Perbup mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2, jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	<b>1 Perda, 1 Perbup, 1 Dokumen Evaluasi</b>	<b>47,810,000.00</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>1, Jumlah Perda dan Perbup mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2, jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	<b>1 Perda, 1 Perbup, 1 Dokumen Evaluasi</b>	<b>36,300,000.00</b>
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20%	47,810,000.00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20%	36,300,000.00
2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 laporan monitoring Evaluasi	0.00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 laporan monitoring Evaluasi	0.00
II	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>1, Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen Review RUPM ; 1 Dokumen Peta Potensi</b>	<b>27,220,000.00</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Balangan	<b>1, Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen Review RUPM ; 1 Dokumen Peta Potensi</b>	<b>26,070,000.00</b>
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Review RUPM	12,500,000.00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Review RUPM	11,850,000.00
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen Peta Potensi	14,720,000.00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen Peta Potensi	14,220,000.00

C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	200 M	85,900,000.00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	200 M	65,640,000.00	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi 3. Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati 4. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	1,2 investor; 2. 5 item ; 3. 1 Laporan ; 4. 2 Kegiatan	85,900,000.00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi 3. Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati 4. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	1,2 investor; 2. 5 item ; 3. 1 Laporan ; 4. 2 Kegiatan	65,640,000.00	
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi	1. 2 investor; 2. 5 item	31,520,000.00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi	1. 2 investor; 2. 5 item	16,650,000.00	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	1. 1 Laporan ; 2. 2 Kegiatan	54,380,000.00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	1. 1 Laporan ; 2. 2 Kegiatan	48,990,000.00	
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	1.Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP; 2. Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100% ; 100 %	155,700,000.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	1.Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP; 2. Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100% ; 100 %	133,400,000.00	
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Izin yang diterbitkan ; 2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelayanan yang harus Dilaksanakan; 3. Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan; 4.Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	1. 700 izin ; 2. 12 kegiatan; 3. 100 %; 4.100 %	155,700,000.00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Izin yang diterbitkan ; 2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelayanan yang harus Dilaksanakan; 3. Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan; 4.Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	1. 700 izin ; 2. 12 kegiatan; 3. 100 %; 4.100 %	133,400,000.00	
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	100%	39,890,000.00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	100%	14,000,000.00	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Persentase izin yang dievaluasi	100%	31,850,000.00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Persentase izin yang dievaluasi	100%	22,490,000.00	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Balangan	Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan	100%	43,600,000.00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Balangan	Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan	100%	52,050,000.00	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	100%	40,360,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	100%	44,860,000.00	
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	132,900,000.00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	95,830,000.00	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Nilai Realisasi Investasi	100 Milyar	132,900,000.00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Nilai Realisasi Investasi	100 Milyar	95,830,000.00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	100 Laporan	25,750,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	100 Laporan	14,520,000.00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	25 Perusahaan	64,900,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	25 Perusahaan	31,210,000.00	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	25 Perusahaan	42,250,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	25 Perusahaan	50,100,000.00	
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	129,100,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	145,910,000.00	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	129,100,000.00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	145,910,000.00	
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. Jumlah Data Penanaman Modal yang Tersedia; 3. Jumlah Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan ; 4. Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	1. 3 Data Perizinan dan Non Perizinan; 2. 1 Data Penanaman Modal ; 3. 6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 4. 1 Dokumen Informasi Penanaman Modal	129,100,000.00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Balangan	1. Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. Jumlah Data Penanaman Modal yang Tersedia; 3. Jumlah Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan ; 4. Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	1. 3 Data Perizinan dan Non Perizinan; 2. 1 Data Penanaman Modal ; 3. 6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 4. 1 Dokumen Informasi Penanaman Modal	145,910,000.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1,220,130,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2,588,869,600
G	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	30%	121,422,000	Catatan Penting
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 dok	121,422,000	12
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan	1 dok	121,422,000	
H	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi	4%	964,975,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi	4%	1,878,645,100	

I	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi	13,87%	681,000,000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi	13,87%	1,701,975,100.00	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	BLK Kab. Balangan	Jumlah paket pelatihan klaster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan	2 paket pelatihan/ 32 orang	681,000,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah paket pelatihan klaster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan	1 paket pelatihan/ 16 orang	321,668,750.00	
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	BLK Kab. Balangan	Jumlah MoU dengan pihak ketiga			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MoU dengan pihak ketiga	3 paket pelatihan	225,000,000.00	
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	BLK Kab. Balangan	Persentase Pemenuhan Sarana Pelatihan BLK			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana Pelatihan BLK	100%	1,155,306,350.00	
II	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah LPKS (kejuruan) terakreditasi	3 LPK	283,975,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS (kejuruan) terakreditasi	3 LPK	92,970,000	
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah LPKS terakreditasi	3 LPK	283,975,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS terakreditasi	3 LPK	92,970,000	
			Juml LPKS terdaftar di OSS/memiliki izin	10 LPK			Juml LPKS terdaftar di OSS/memiliki izin	10 LPK		
			Juml lulusan LPKS yang kompeten	100 org			Juml lulusan LPKS yang kompeten	100 org		
III	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah pelaku usaha kecil yang mengikuti konsultasi peningkatan produktivitas			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah pelaku usaha kecil yang mengikuti konsultasi peningkatan produktivitas	20 orang	83,700,000	
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Balangan	Jumlah peserta konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah orang/Pelaku perusahaan kecil, mikro dan Menengah	20 orang	83,700,000	
J	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Presentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri	65%	130,155,000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Penempatan Tenaga Kerja	65%	222,122,500	
I	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	1500 orang	130,155,000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	1500 orang	222,122,500	
1	Pelayanan antar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantaraan kerja	750 orang	130,155,000	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantaraan kerja	750 orang	124,532,500	
2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Balangan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan	5 orang	38,195,000	
3	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Balangan	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirausaha Baru			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirausaha Baru	20 orang	59,395,000	
K	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	90%	125,000,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	90%	366,680,000	
I	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10%	60,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10%	110,620,000	
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah dokumen informasi sarana HI setiap tahun	1 dok	60,000,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi sarana HI setiap tahun	1 dok	110,620,000	
			Jumlah pembinaan aturan ketenagakerjaan	3 kali			Jumlah pembinaan aturan ketenagakerjaan	3 kali		
			Jumlah monitoring perusahaan	5 kali			Jumlah monitoring perusahaan	5 kali		
II	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi	80%	65,000,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi	80%	256,060,000	
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pembinaan pencegahan PHI	1 kali	40,000,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pencegahan PHI	2 kali	216,850,000	
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah kasus PHI yang difasilitasi	3 Kasus	25,000,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHI yang difasilitasi	3 Kasus	39,210,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					250,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
L	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase fasilitas satuan permukiman yang dibangun		53,080,000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitas satuan permukiman yang dibangun		0	
I	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah warga non Transmigrasi menjadi warga transmigras	2 KK	53,080,000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga non Transmigrasi menjadi warga transmigras		0	
1	Penyuluhan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah frekuensi Kegiatan Penyuluhan	2 KK	53,080,000	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah frekuensi Kegiatan Penyuluhan		0	
M	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	18,91%	196,920,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	18,91%	226,457,000	

Pagu anggaran sebagian dialihkan utk belanja listrik, air, internet dan gaji honor



1	<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>		<i>Luas Lahan yang dapat dikelola oleh warga transmigrasi di kawasan transmigrasi</i>	<i>64.30 ha</i>	<i>196,920,000</i>	<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>		<i>Luas Lahan yang dapat dikelola oleh warga transmigrasi di kawasan transmigrasi</i>	<i>64.30 ha</i>	<i>226,457,000.00</i>
1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah frekuensi kegiatan Penguatan SDM	1 Kali	88,044,000	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah frekuensi kegiatan Penguatan SDM	2 Kali	50,730,000.00
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	2 Paket	108,876,000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kawasan Transmigrasi Kab. Balangan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	2 Paket	175,727,000.00

**Total Pagu**

**10,294,449,300.00**

**12,394,080,500.00**

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota : Kalimantan Selatan/Balangan/Paringin**  
**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Balangan	<b>Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Balangan	<b>Nilai Realisasi Investasi PMDN</b>	<b>238.65 Milyar</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	100 Laporan	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Balangan	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	25 Perusahaan	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Balangan	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	20 Perusahaan	

#### *2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Tabel T - C.33.  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Balangan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
			Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kabupaten Balangan				DPMPTSP						
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan				DPMPTSP						
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Balangan	71 (BB)	9,075,603,900.00			9,529,384,095.00				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)										
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		90%			90%	-				
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	Kabupaten Balangan	100%	101,280,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	106,344,000.00	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	Kabupaten Balangan	100%	11,900,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	12,495,000.00
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase RKA - SKPD DPMPTSP yang baik	Kabupaten Balangan	100%	13,124,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	13,780,200.00
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang baik	Kabupaten Balangan	100%	6,184,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	6,493,200.00
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase DPA - SKPD yang baik	Kabupaten Balangan	100%	10,404,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	10,924,200.00
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang baik	Kabupaten Balangan	100%	6,184,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	6,493,200.00
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	Kabupaten Balangan	100%	47,300,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	49,665,000.00
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	Kabupaten Balangan	100%	6,184,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	6,493,200.00
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Kabupaten Balangan	100%	7,289,058,100.00	APBD	DPMPTSP	100%	7,653,511,005.00	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang membayar gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	6,894,449,300.00	APBD	DPMPTSP	100%	7,239,171,765.00
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Kabupaten Balangan	100%	358,320,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	376,236,000.00
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	Kabupaten Balangan	100%	7,684,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	8,068,200.00
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	7,684,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	8,068,200.00
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Balangan	100%	7,684,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	8,068,200.00
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	7,684,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	8,068,200.00
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	5,552,800.00	APBD	DPMPTSP	100%	5,830,440.00
2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	100%	281,900,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	295,995,000.00	

2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan	Kabupaten Balangan	50 stell, 50 stell	37,500,000.00	APBD	DPMPTSP	50 stell, 50 stell	39,375,000.00
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	100%	244,400,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	256,620,000.00
2	18	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>263,381,400.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>276,550,470.00</b>
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	84 buah	20,205,400.00	APBD	DPMPTSP	90 buah	21,215,670.00
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Balangan	3 buah	10,000,000.00	APBD	DPMPTSP	10 buah	10,500,000.00
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Balangan	262 pak ; 40,000 lembar	35,616,000.00	APBD	DPMPTSP	244 pak ; 50,000 lembar	37,396,800.00
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kabupaten Balangan	2 bahan bacaan	4,000,000.00	APBD	DPMPTSP	3 bahan bacaan	4,200,000.00
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	182 orang/hari	193,560,000.00	APBD	DPMPTSP	252 orang/hari	203,238,000.00
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>8 buah, 1 paket</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>8 buah, 1 paket</b>	<b>-</b>
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Kabupaten Balangan	2 buah	-	APBD	DPMPTSP	4 buah	-
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Kabupaten Balangan	6 buah	-	APBD	DPMPTSP	2 buah	-
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Kabupaten Balangan	1 paket	-	APBD	DPMPTSP	2 buah, 1 paket	-
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>707,394,400.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>12 bulan</b>	<b>742,764,120.00</b>
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Balangan	12 bulan	0.00	APBD	DPMPTSP	12 bulan	-
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	100%	383,100,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	402,255,000.00
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	12 bulan	324,294,400.00	APBD	DPMPTSP	12 bulan	340,509,120.00
2	18	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>432,590,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>12 bulan</b>	<b>454,219,500.00</b>
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	Kabupaten Balangan	100%	324,350,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	340,567,500.00
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	Kabupaten Balangan	100%	108,240,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	113,652,000.00
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi	Kabupaten Balangan	-	-	APBD	DPMPTSP	-	-
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>1. Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha 2. Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>1. 2 Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha ; 2. 1 Potensi Investasi Daerah</b>	<b>62,370,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>1. 2 Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha ; 2. 1 Potensi Investasi Daerah</b>	<b>65,488,500.00</b>
2	18	02	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Jumlah Perda dan Perbup mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>1 Perda, 1 Perbup , 1 Dokumen Evaluasi</b>	<b>36,300,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>1 Perbup , 1 Dokumen Evaluasi</b>	<b>38,115,000.00</b>
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	20%	36,300,000.00	APBD	DPMPTSP	20%	38,115,000.00
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	1 laporan monitoring Evaluasi	0.00	APBD	DPMPTSP	APBD	-
2	18	02	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>1 Dokumen Review RUPM ; 1 Dokumen Peta Potensi</b>	<b>26,070,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>1 Dokumen Review RUPM ; 1 Dokumen Peta Potensi</b>	<b>27,373,500.00</b>

2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1 Dokumen Review RUPM	11,850,000.00	APBD	DPMPTSP	1 Dokumen Review RUPM	12,442,500.00
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	1 Dokumen Peta Potensi	14,220,000.00	APBD	DPMPTSP	1 Dokumen Peta Potensi	14,931,000.00
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>200 M</b>	<b>65,640,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>210 M</b>	<b>68,922,000.00</b>
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi 3. Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati 4. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	Kabupaten Balangan	1.2 investor; 2. 5 item ; 3. 1 Laporan ; 4. 2 Kegiatan	65,640,000.00	APBD	DPMPTSP	1.2 investor; 2. 5 item ; 3. 1 Laporan ; 4. 2 Kegiatan	68,922,000.00
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah calon investor yang berminat investasi 2. Jumlah item media promosi	Kabupaten Balangan	1. 2 investor; 2. 5 item	16,650,000.00	APBD	DPMPTSP	1. 2 investor 2. 5 item	17,482,500.00
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	Kabupaten Balangan	1. 1 Laporan ; 2. 2 Kegiatan	48,990,000.00	APBD	DPMPTSP	1. 1 Laporan ; 2. 2 Kegiatan	51,439,500.00
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP; 2. Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100% ; 100 %</b>	<b>133,400,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100% ; 100 %</b>	<b>140,070,000.00</b>
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Izin yang diterbitkan ; 2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelayanan yang harus Dilaksanakan; 3. Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan; 4.Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Balangan	1. 700 izin ; 2. 12 kegiatan; 3. 100 %; 4.100 %	133,400,000.00	APBD	DPMPTSP	1. 700 izin ; 2. 12 kegiatan; 3. 100 %; 4.100 %	140,070,000.00
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	Kabupaten Balangan	100%	14,000,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	14,700,000.00
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dievaluasi	Kabupaten Balangan	100%	22,490,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	23,614,500.00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Konsultasi dan Pengaduan Diselesaikan	Kabupaten Balangan	100%	52,050,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	54,652,500.00
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	Kabupaten Balangan	100%	44,860,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	47,103,000.00
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>95,830,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>100,621,500.00</b>
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi	Kabupaten Balangan	100 Milyar	95,830,000.00	APBD	DPMPTSP	110 Milyar	100,621,500.00
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	100 Laporan	14,520,000.00	APBD	DPMPTSP	100 Laporan	15,246,000.00
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	Kabupaten Balangan	25 Perusahaan	31,210,000.00	APBD	DPMPTSP	25 Perusahaan	32,770,500.00
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	Kabupaten Balangan	25 Perusahaan	50,100,000.00	APBD	DPMPTSP	20 Perusahaan	52,605,000.00
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Balangan</b>	<b>100%</b>	<b>145,910,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>153,205,500.00</b>
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	100%	145,910,000.00	APBD	DPMPTSP	100%	153,205,500.00

2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan ; 2. Jumlah Data Penanaman Modal yang Tersedia; 3. Jumlah Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan ; 4. Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	1. 3 Data Perizinan dan Non Perizinan; 2. 1 Data Penanaman Modal ; 3. 6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 4. 1 Dokumen Informasi Penanaman Modal	145,910,000.00	APBD	DPMPSTP	1. 3 Data Perizinan dan Non Perizinan; 2. 1 Data Penanaman Modal ; 3. 6 Layanan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 4. 1 Dokumen Informasi Penanaman Modal	153,205,500.00	
2	07	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja</b>			<b>100%</b>	<b>121,422,000.00</b>	APBD	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>100%</b>	<b>127,493,100.00</b>
2	07	02	2.01		<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</i>			<b>100%</b>	<b>121,422,000.00</b>			<b>100%</b>	<b>127,493,100.00</b>
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan			121,422,000.00	APBD	DISNAKERTRANS		127,493,100.00
2	07	03			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi</b>			<b>6 paket pelatihan/ 96 orang</b>	<b>1,878,645,100.00</b>	APBD	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>6 paket pelatihan/ 96 orang</b>	<b>1,972,577,355.00</b>
2	07	03	2.01		<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klater kompetensi</i>				<b>1,701,975,100.00</b>	APBD	DISNAKERTRANS		<b>1,787,073,855.00</b>
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah paket pelatihan klaster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan	BLK Kab. Balangan	<b>3 Lembaga</b>		321,668,750.00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>3 Lembaga</b>	337,752,187.50
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MoU dengan pihak ketiga	BLK Kab. Balangan	<b>5 Kejuruan</b>		225,000,000.00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>5 Kejuruan</b>	236,250,000.00
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana Pelatihan BLK	BLK Kab. Balangan	<b>10 Instruktur</b>		1,155,306,350.00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>10 Instruktur</b>	1,213,071,667.50
2	07	03	2.02		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah LPKS (kejuruan) terakreditasi</b>			<b>3 Dokumen</b>	<b>92,970,000.00</b>	APBD	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>97,618,500.00</b>
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS terakreditasi Juml LKPS terdaftar di OSS/memiliki izin Juml lulusan LPKS yang kompeten	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	<b>75%</b> <b>75%</b>		92,970,000.00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>75%</b> <b>75%</b>	97,618,500.00
2	07	03	2.04		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah pelaku usaha kecil yang mengikuti konsultasi peningkatan produktivitas</b>			<b>1500 orang</b>	<b>83,700,000.00</b>	APBD	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>1500 orang</b>	<b>87,885,000.00</b>
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah orang/Pelaku perusahaan kecil, mikro dan Menengah	Kab. Balangan	100 lowongan		83,700,000.00	APBD	DISNAKERTRANS	100 lowongan	87,885,000.00
2	07	04			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Presentase Penempatan Tenaga Kerja</b>			<b>1500 orang</b>	<b>222,122,500.00</b>	APBD	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>1500 orang</b>	<b>233,228,625.00</b>
2	07	04	2.01		<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja</i>			<b>1500 orang</b>	<b>222,122,500.00</b>	APBD	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>1500 orang</b>	<b>233,228,625.00</b>
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantaraan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	40 orang		124,532,500.00	APBD	DISNAKERTRANS	40 orang	130,759,125.00
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan	Kab Balangan	40 orang		38,195,000.00	APBD	DISNAKERTRANS	40 orang	40,104,750.00
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirausaha Baru	Kab. Balangan	5 orang		59,395,000.00	APBD	DISNAKERTRANS	5 orang	62,364,750.00
2	07	05			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi</b>			<b>20 orang</b>	<b>366,680,000.00</b>				<b>385,014,000.00</b>
2	07	05	2.01		<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</i>			<b>5 LPTKS/BKK</b>	<b>110,620,000.00</b>	APBD	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>5 LPTKS/BKK</b>	<b>116,151,000.00</b>
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi sarana HI setiap tahun Jumlah pembinaan aturan ketenagakerjaan Jumlah monitoring perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Balangan	<b>100%</b>		110,620,000.00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>100%</b>	<b>116,151,000.00</b>
2	07	05	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi</b>			<b>50%</b>	<b>256,060,000.00</b>	APBD	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>50%</b>	<b>268,863,000.00</b>
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pencegahan PHI	Kab. Balangan	<b>90%</b>		216,850,000.00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>90%</b>	<b>227,692,500.00</b>
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHI yang difasilitasi	Kab. Balangan	<b>2 Perusahaan</b>		39,210,000.00	APBD	DISNAKERTRANS	<b>2 Perusahaan</b>	<b>41,170,500.00</b>
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>					<b>226,457,000.00</b>				<b>237,779,850.00</b>
3	32	03			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase fasilitas satuan permukiman yang dibangun</b>			<b>1 Dokumen</b>	-	APBD	<b>DISNAKERTRANS</b>	<b>1 Dokumen</b>	-

